



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 62/PHP.KOT-XIX/2021
PERKARA NOMOR 75/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021**

**PERIHAL
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN WALI KOTA BALIKPAPAN
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI KUTAI
KARTANEGARA
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI KUTAI TIMUR**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SELASA, 26 JANUARI 2021



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 62/PHP.KOT-XIX/2021
PERKARA NOMOR 75/PHP.BUP-XIX/2021
PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021**

PERIHAL

- Perselisihan Hasil Pemilihan Wali Kota Balikpapan
- Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kutai Kartanegara
- Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Kutai Timur

PEMOHON

- Zulkifli, Adi Dharma Wiranata, Rinto, Ferdy Yuliansyah, Muhammad Ambran Agus, Muhammad Rizal Fadillah, Iqbal Mulyono, Irisma, Hamjah (62/PHP.KOT-XIX/2021)
- Mohammad Joesoef Alias HM. Jusuf Rizal dan Mustakim Ishak (75/PHP.BUP-XIX/2021)
- Mahyunadi dan Lulu Kinsu (91/PHP.BUP-XIX/2021)

TERMOHON

- KPU Kota Balikpapan
- KPU Kabupaten Kutai Kartanegara
- KPU Kabupaten Kutai Timur

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 26 Januari 2021, Pukul 13.49 – 15.19 WIB
Ruang Sidang Pleno Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 3) Saldi Isra | (Anggota) |

**Haifa Arief Lubis
Rizki Amalia
Jefri Porkonanta Tarigan**

**Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 62/PHP.KOT-XIX/2021:

1. Rinto
2. Zulkifli

B. Termohon Perkara Nomor 62/PHP.KOT-XIX/2021:

Ridwansyah

C. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 62/PHP.KOT-XIX/2021:

Wawan Sanjaya

D. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 62/PHP.KOT-XIX/2021:

1. Tomic Minzathu
2. Ahmad Yani

E. Bawaslu Perkara Nomor 62/PHP.KOT-XIX/2021:

1. Agustan
2. Ahmad Aziz
3. Wamustofa Hamzah
4. Faridah

F. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 75/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Moh. Maulana
2. Nur Akifah Janur

G. Termohon Perkara Nomor 75/PHP.BUP-XIX/2021:

Purnomo

H. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 75/PHP.BUP-XIX/2021:

Hifdzil Alim

I. Pihak Terkait Perkara Nomor 75/PHP.BUP-XIX/2021:

Rendi Solihin

J. Bawaslu Perkara Nomor 75/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Muhammad Rahman

2. Ali Mukid
3. Yulia Parlina
4. Sofiyani

K. Pemohon Perkara Nomor 91/PHP.BUP-XIX/2021:

Lulu Kinsu

L. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 91/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Sururudin
2. Harli Muin
3. Franditya Utomo

M. Termohon Perkara Nomor 91/PHP.BUP-XIX/2021:

Sayuti Ibrahim

N. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 91/PHP.BUP-XIX/2021:

Ikhwan Fahrojih

O. Pihak Terkait Perkara Nomor 91/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Ardiansyah Sulaiman
2. Kasmidi Bulang

P. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 91/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Donal Fariz
2. Anang Nugraha

Q. Bawaslu Perkara Nomor 91/PHP.BUP-XIX/2021:

1. Andi Mappaseling
2. Muhammad Idris
3. Siti Ahlis Muafin
4. Budi Wibowo

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.49 WIB

1. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, kita mulai. Ini kalau diperhatikan ... untuk perhatian teman-teman, ya. Besok diatur agak ... antarmeja satu dengan lain agak direnggangkan, ini juga agak direnggangkan supaya betul-betul bisa social distancing, ya. Ya, agak direnggangkan masih bisa. Ini kalau ... apa ... terlalu dekat meskipun sesama kelompok, kan tahu kalau yang satu sehat, satu sehat. Tapi kalau ada kelompok yang lain, kan antara Pemohon satu atau PKPU satu ini, kan enggak tahu ini satunya sehat betul atau enggak. Meskipun sudah diperiksa di sini yang bersangkutan negatif terpapar Covid, tetapi untuk kepentingan protokol kesehatan agak digeser, ya!

Baik. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmannirrahim.

Sidang dalam Perkara Nomor 62/PHP.KOT-XIX/2021, Nomor 75/PHP.BUP-XIX/2021, dan Nomor 91/PHP.BUP-XIX/2021, dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Agenda persidangan kali ini adalah kita bersama-sama mendengarkan secara lisan Permohonan dari Para Pemohon. Kepada kita semua, sudah disampaikan secara tertulis Permohonannya.

Oleh karena itu, kita sudah membaca dan semua sudah mengetahui, baik Permohonan yang pertama maupun kalau ada perbaikan, itu semuanya diserahkan.

Kemudian yang kedua, kenapa Pihak Terkait masih duduk di sana? Karena Pihak Terkait itu masih menjadi Calon Pihak Terkait, belum tahu pasti Permohonannya belum dibacakan. Jadi, apa betul dia Pihak Terkait atau tidak, itu belum diketahui. Sehingga, nanti pada akhir persidangan ini akan disahkan untuk menjadi Pihak Terkait.

Oleh karena itu, pada persidangan yang akan datang, Pihak Terkait sudah duduk di depan situ. Gitu, ya, Pihak Terkait, ya? Mekanisme persidangannya begitu.

Terus kemudian begini, kita karena patuh disiplin terhadap protokol kesehatan, maka pertemuan di forum yang semacam ini jumlahnya satu dibatasi.

Yang kedua, waktunya juga sangat terbatas. Untuk memenuhi supaya Hukum Acara terpenuhi, protokol kesehatan terpenuhi, dalam rangka untuk menjaga jangan sampai terpapar Covid-19, maka waktunya juga dibatasi. Teman-teman harus disiplin, maskernya dipakai yang benar, dan nanti berbicaranya juga dibatasi, tidak berpanjang-panjang bicaranya. Karena aturan mainnya sebetulnya sangat terbatas dalam pertemuan ini. Kita punya waktu sekitar satu setengah jam,

sehingga satu setengah jam dibagi tiga Pemohon, ya? Sehingga, itu harus ketat.

Kemudian, yang disampaikan oleh karena itu pokok-pokoknya saja, yang tertulis sudah kita baca semua, dan semuanya sudah tahu. Pokok-pokoknya saja yang disampaikan itu. Satu, identitasnya. Kemudian, yang menyangkut ... yang kedua, masalah yang berhubungan dengan bisa kedudukan hukum, objeknya ... objeknya dulu, kedudukan hukum, tenggang waktunya. Kemudian, dalil-dalilnya secara ringkas, tidak perlu ilustrasi atau tidak perlu narasinya panjang lebar, itu sudah ada di ... tertulis Permohonannya. Dan yang terakhir, di Petitiumnya.

Baik, kita mulai. Saya ingin kenal dulu forum ini, ingin ngerti dulu siapa yang hadir di Pemohon Nomor 62/PHP.BUP-XIX/2021? Silakan, perkenalkan diri siapa yang hadir!

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PHP.KOT-XIX/2021: RINTO

Baik. Terima kasih Hakim Mahkamah yang kami hormati. Kami dari Perkara Nomor 62/PHP.BUP-XIX/2021 atas nama Rinto, Yang Mulia.

Terima kasih.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Atas nama Rinto?

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PHP.KOT-XIX/2021: RINTO

Rinto, ya.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sebelahnya siapa?

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PHP.KOT-XIX/2021: ZULKIFLI

Mohon izin, Yang Mulia. Nama saya Zulkifli, Yang Mulia.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oh, Zulkifli. Zulkifli dan Rinto yang hadir ini, ya? Ini sebagai pemantau?

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PHP.KOT-XIX/2021: RINTO

Benar, Yang Mulia, sebagai pemantau.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Betul, sebagai pemantau. Saudara punya sertifikat sebagai pemantau dari Bawaslu atau KPU? KPU, ya?

10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PHP.KOT-XIX/2021: RINTO

Dari KPU, Yang Mulia.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ada?

12. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PHP.KOT-XIX/2021: RINTO

Ada, Yang Mulia.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Dilampirkan dalam Permohonan?

14. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PHP.KOT-XIX/2021: RINTO

Sudah, Yang Mulia.

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sudah, ya? Baik, nanti dicek.

Terus, Pemohon perkara yang berikutnya, Nomor 75/PHP.BUP-XIX/2021, siapa yang hadir? Silakan!

16. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PHP.BUP-XIX/2021: MOH. MAULANA

Ya, baik. Terima kasih atas (...)

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Itu maskernya enggak usah dibuka, tutup saja!

18. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PHP.BUP-XIX/2021: MOH. MAULANA

Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan, Yang Mulia.
Perkenalkan yang hadir dalam persidangan hari ini adalah saya Mohammad Maulana dan rekan saya Nur Akifah Janur yang keduanya bertindak sebagai Kuasa Pemohon, Yang Mulia (...)

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, baik.

20. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PHP.BUP-XIX/2021: MOH. MAULANA

Pemantau.

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, kemudian Perkara Nomor 91/PHP.BUP-XIX/2021 Kutai Timur, siapa yang hadir, Pemohon?

22. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: SURURUDIN

Baik, Yang Mulia. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami dari Pemohon Nomor 91/PHP.BUP-XIX/2021 Kabupaten Kutai Timur. Hadir saya Sururudin, Yang Mulia. Izin, Yang Mulia, kami ingin menyampaikan (...)

23. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Harli Muin?

24. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: SURURUDIN

Harli Muin.

25. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, terus!

26. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: SURURUDIN

Saya Sururudin, Yang Mulia.

27. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Siapa?

28. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: SURURUDIN

Dan untuk Surat Kuasa, ini kemarin ada yang tertinggal. Jadi, akan kami susulkan, Yang Mulia.

29. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

30. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: SURURUDIN

Selanjutnya (...)

31. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ini yang Sururudin?

32. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: SURURUDIN

Ya.

33. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Yang hadir?

34. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: SURURUDIN

Ya.

35. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Satunya siapa?

36. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: SURURUDIN

Harli Muin.

37. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: HARLI MUIN

Harli Muin, Yang Mulia.

38. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Harli Muin, oke.

39. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: SURURUDIN

Dan izin, Yang Mulia, di zoom ada H. Lulu Kinsu dan Franditya.

40. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik.

41. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: SURURUDIN

Terima kasih, Yang Mulia.

42. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Melalui daring ada dua, ya? Baik.

Sekarang yang berikutnya, saya minta memperkenalkan diri, KPU dari Kota Ponti ... Kota Balikpapan. Termohon, siapa yang hadir?

43. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 62/PHP.KOT-XIX/2021: WAWAN SANJAYA

Ya. Baik, terima kasih. Mohon izin, Yang Mulia. Saya Wawan Sanjaya selaku Kuasa Hukum dari KPU Balikpapan, yang pada kesempatan hari ini hadir bersama Komisioner KPU Balikpapan di Bidang Hukum, Bapak Ridwansyah, Yang Mulia.

44. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Yang di belakang itu? Pakai baju cokelat?

45. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 62/PHP.KOT-XIX/2021: WAWAN SANJAYA

Betul, Yang Mulia.

46. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Terus kemudian, KPU Perkara Nomor 75/PHP.BUP-XIX/2021 Kutai Kartanegara!

47. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 75/PHP.BUP-XIX/2021: HIFDZIL ALIM

Mohon izin, Yang Mulia, untuk Perkara Nomor 75/PHP.BUP-XIX/2021 Prinsipal hadir, Komisioner Divisi Hukum atas nama Purnomo dan didampingi Kuasa Hukumnya Hifdzil Alim, Yang Mulia.

48. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Kuasa Hukumnya, Rendi Solihin?

49. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 75/PHP.BUP-XIX/2021: HIFDZIL ALIM

Hifdzil Alim, Yang Mulia.

50. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oh.

51. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 75/PHP.BUP-XIX/2021: HIFDZIL ALIM

Perkara Nomor 75/PHP.BUP-XIX/2021.

52. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oh, Perkara Nomor 75/PHP.BUP-XIX/2021, Termohon.
Oke, baik.

53. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 75/PHP.BUP-XIX/2021: HIFDZIL ALIM

Terima kasih.

54. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terus kemudian, Perkara Nomor 91/PHP.BUP-XIX/2021!

55. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: IKHWAN FAHROJIH

Terima kasih, Yang Mulia. Perkara Nomor 91/PHP.BUP-XIX/2021 dari KPU Kutai Timur, saya Ikhwan Fahrojih sebagai Kuasa Hukum dan ada Bapak Sayuti Ibrahim sebagai Anggota Komisi ... KPU Kabupaten Kutai Timur Divisi Hukum, Yang Mulia. Beliau ada di belakang saya.

Terima kasih, Yang Mulia.

56. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih.

Sekarang berikutnya, Bawaslu. Bawaslu Kota Balikpapan dulu.

57. BAWASLU PERKARA NOMOR 62/PHP.KOT-XIX/2021: AGUSTAN

Terima kasih, Yang Mulia. Mohon izin, perkenalkan saya Agustan dari Bawaslu Kota Balikpapan bersama Pak Ahmad Aziz.

Kemudian, yang hadir juga dalam daring, Pak Yang Mulia, ada dua orang, Pak Wamustofa Hamzah dan Ibu Faridah.

Terima kasih, Yang Mulia.

58. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Bawaslu Perkara Nomor 75/PHP.BUP-XIX/2021 Kutai Kartanegara!

59. BAWASLU PERKARA NOMOR 75/PHP.BUP-XIX/2021: ALI MUKID

Mohon izin, Yang Mulia. Saya Ali Mukid (Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara) hadir di sini bersama Yulia Parlina (Anggota Bawaslu Kutai Kartanegara). Hadir melalui daring, Ketua Bawaslu Kutai Kartanegara, Muhammad Rahman bersama Muhammad So ... bersama Sofiyon (Anggota Bawaslu Kutai Kartanegara).

60. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Perkara Nomor 91/PHP.BUP-XIX/2021 Bawaslu.

61. BAWASLU PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: MUHAMMAD IDRIS

Mohon izin, Yang Mulia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Idris dari Bawaslu Kabupaten Kutai Timur, Divisi Hukum. Hadir di sini bersama Ibu Siti Ahlis Muafin (Divisi Pengawasan). Dan melalui zoom, ada Ketua Bawaslu Kabupaten Kutai Timur, Pak Andi Mappaseling, dan Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Mas Budi Wibowo.

Demikian, Yang Mulia.

62. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih. Sekarang sementara Calon Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 62/PHP.KOT-XIX/2021 Kota Balikpapan, siapa yang hadir? Silakan! Ada miknya tolong dianukan ... dihidupkan!

63. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 62/PHP.KOT-XIX/2021: TOMIC MINZATHU

Baik, yang Mulia. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, saya Tomic Minzathu didampingi dengan rekan saya atas nama Ahmad Yani, Yang Mulia.

64. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ahmad Yani dan Tomic, ya?

65. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 62/PHP.KOT-XIX/2021: TOMIC MINZATHU

Siap, Yang Mulia.

66. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Pihak Terkait Perkara Nomor 75/PHP.BUP-XIX/2021, silakan!

67. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 75/PHP.BUP-XIX/2021: RENDI SOLIHIN

Terima kasih, Yang Mulia. Saya H. Rendi Solihin, Prinsipal.

68. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

**69. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 75/PHP.BUP-XIX/2021:
RENDI SOLIHIN**

Saya Pihak Terkait dari Kutai Kartanegara.

70. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Dari Kutai Kartanegara (...)

**71. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 75/PHP.BUP-XIX/2021:
RENDI SOLIHIN**

Kutai Kartanegara.

72. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Pihak Terkait, siapa?

**73. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 75/PHP.BUP-XIX/2021:
RENDI SOLIHIN**

Prinsipal.

74. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Prinsipalnya?

**75. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 75/PHP.BUP-XIX/2021:
RENDI SOLIHIN**

Ya.

76. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Di sini ada dua Kuasa, Rendi sama Anwar, enggak hadir?

**77. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 75/PHP.BUP-XIX/2021:
RENDI SOLIHIN**

Rendi, saya.

78. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Rendi?

**79. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 75/PHP.BUP-XIX/2021:
RENDI SOLIHIN**

Yang Mulia.

80. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oh. Terus Prinsipalnya, siapa?

**81. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 75/PHP.BUP-XIX/2021:
RENDI SOLIHIN**

Prinsipalnya saya sendiri.

82. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

**83. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 75/PHP.BUP-XIX/2021:
RENDI SOLIHIN**

Ya.

84. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Pakai toga itu, enggak?

**85. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 75/PHP.BUP-XIX/2021:
RENDI SOLIHIN**

Kenapa?

86. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Enggak pakai toga, ya?

**87. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 75/PHP.BUP-XIX/2021:
RENDI SOLIHIN**

Ndak. Tidak, tidak.

88. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Karena Prinsipal, ya?

89. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 75/PHP.BUP-XIX/2021: RENDI SOLIHIN

Ya.

90. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Oh, Pak Rendi itu Prinsipal. Ini Pak Anwar, enggak hadir, ya?

91. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 75/PHP.BUP-XIX/2021: RENDI SOLIHIN

Pak Anwar belum hadir.

92. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke, Prinsipal.

Perkara Nomor 91/PHP.BUP-XIX/2021, Pihak Terkait!

93. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: DONAL FARIZ

Terima kasih, Yang Mulia.

Dari Perkara Nomor 91/PHP.BUP-XIX/2021, hadir ... dan secara daring juga ikut Ardriansyah Sulaiman dan Bapak Kasmidi Bulang. Kemudian juga ada Kuasa juga hadir, Line Febridiansyah dan Anang Nugraha.

Demikian, terima kasih, Yang Mulia.

94. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Baik, sekarang kita mulai dari Pemohon Kota Balikpapan. Saya persilakan! Tadi sudah saya sampaikan, pokok-pokoknya saja.

95. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PHP.KOT-XIX/2021: RINTO

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Sebelum membacakan Permohonan, perlu kami sampaikan, Yang Mulia. Bahwa dalam Permohonan kami ini, kami kembali mengajukan renvoi perbaikan atas kesalahan (...)

96. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, ini sebelumnya saya sampaikan, ya, untuk pengetahuan kita bersama.

97. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PHP.KOT-XIX/2021: RINTO

Baik.

98. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sesuai dengan Hukum Acara, Permohonan awal itu 3x24 setelah diumumkan oleh KPU masing-masing kabupaten/kota dan provinsi.

Kemudian, masih diberi kesempatan untuk 3x24 jam melakukan Perbaikan Permohonan. Dalam Perbaikan Permohonan yang termasuk tenggang waktu 3x24 jam itu sebelum diregister, maka Saudara-Saudara bisa memperbaiki, baik substansi maupun typo-nya.

Tapi kemudian, di dalam persidangan kali ini, maka Perbaikan Permohonan hanya dimungkinkan dalam hal perbaikan typo saja, tidak boleh mengubah substansi sama sekali. Misalnya begini saja, namanya salah diubah, itu sudah substansi. Kecamatannya salah, diubah, itu sudah substansi. Nama kotanya salah, provinsinya salah, diubah, itu sudah substansi, ya? Karena menyangkut objeknya, subjeknya, itu sudah perubahan. Apalagi, kemudian perubahan angka-angka.

Oleh karena itu, menjadi anukan ... sama ... bersama. Kemudian dalam rangka perbaikan, itu kemungkinan juga terjadi begini. Permohonan awal masuk tenggang waktu karena masih dalam kerangka 3x24 jam. Perbaikan pertama dimasukkan, kemudian ada perbaikan kedua, perbaikan ketiga. Yang dipakai dalam PMK, disebutkan hanya perbaikan yang pertama, ya. Perbaikan kedua dan ketiga itu tidak dianggap lagi. Gitu, ya?

Nah, ini yang mau disampaikan apa? Perbaikan apa?

99. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PHP.KOT-XIX/2021: RINTO

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Perlu saya sampaikan bahwa kesalahan ketik kami di sini adalah pada pengetikan angka.

100. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Nah, itu tadi.

101. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PHP.KOT-XIX/2021: RINTO

Tapi mohon izin, Yang Mulia, apakah boleh kami meminta untuk mempertunjukkan kepada ... apa ... melihat ... apa ... menunjukkan kepada, Yang Mulia?

102. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sekarang begini saja, ya. Itu disampaikan, tapi nanti Mahkamah yang menilai, termasuk tanggapan dari Termohon dan Pihak Terkait, bagaimana? Tapi disampaikan, terserah, ya? Apakah kemudian direaksi itu termasuk substansi, apakah itu perbaikan typo, tergantung pada penilaian Hakim, tergantung pada nanti jawaban dari masing-masing pihak, ya? Tapi bisa disampaikan. Silakan!

103. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PHP.KOT-XIX/2021: RINTO

Baik, Yang Mulia. Perlu kami sampaikan bahwa kami sebenarnya sudah melengkapi juga renvoi pada ... apa ... kesalahan ketik yang kami (...)

104. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ini yang akan dibacakan Perbaikan Permohonan atau Permohonan awal? Anda melakukan Perbaikan Permohonan?

105. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PHP.KOT-XIX/2021: RINTO

Benar, Yang Mulia.

106. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Kapan itu? Masih ... tenggang waktunya masih?

107. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PHP.KOT-XIX/2021: RINTO

Bagaimana, Yang Mulia?

108. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Kamu kan tidak ada perbaikan? Jadi, ini yang ada di dalam catatan di Mahkamah, Anda mengajukan Permohonan pada tanggal 18 Desember 2020, pada pukul 22.59 WIB secara online. Pemohon keliru menyantumkan tanggal dan pukul pengajuan Permohonan. Di dalam Permohonannya, Pemohon menyantumkan tanggal 21, pukul 20.00 WIB ... pukul 14.23 WIB. Catatan kami, tidak ada Perbaikan Permohonan.

Sekarang, bagaimana ini yang mau dibacakan berarti kan Permohonan awal? Sekarang apa itu?

109. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PHP.KOT-XIX/2021: RINTO

Oke, baik, Yang Mulia. Hemat kami, kami kira tadi itu di dalam persidangan ini kami boleh mengajukan perbaikan mengenai renvoi tersebut.

110. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Lah, kalau perbaikan, kita menunjuk pada Permohonan awal.

111. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PHP.KOT-XIX/2021: RINTO

Baik.

112. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, Permohonan awal (...)

113. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PHP.KOT-XIX/2021: RINTO

Ya, sehingga (...)

103. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Yang Anda bacakan. Itu yang diperbaiki yang mana?

104. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PHP.KOT-XIX/2021: RINTO

Ya, baik. Kami akan membacakan Permohonan awalnya, Yang Mulia. Mungkin kiranya nanti, kan kami sudah ... sebetulnya renvoi kami

juga tertulis. Apakah nanti kami lampirkan ataukah di dalam pada saat kami membaca, kami sebutkan juga kesalahan ketik yang kami (...)

114. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Pokok-pokoknya nanti itu diserahkan kepada Mahkamah. Anda buat berapa eksemplar itu?

115. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PHP.KOT-XIX/2021: RINTO

8 eksemplar, Yang Mulia.

116. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Eksemplar perbaikannya?

110. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PHP.KOT-XIX/2021: RINTO

Benar, Yang Mulia.

111. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Sekarang diserahkan di ... tolong diambil!

112. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PHP.KOT-XIX/2021: RINTO

Baik, Yang Mulia.

113. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tapi itu yang menilai nanti apakah itu nanti digunakan atau tidak adalah Mahkamah. Termasuk nanti, apakah Para Termohon, Pihak Terkait, meresponsnya itu sudah termasuk perbaikan yang masuk substansi, sehingga menurut PMK sudah tidak bisa digunakan lagi.

Prof. Saldi, ada? Silakan, Prof!

117. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya, ini demi kepastian, ya, Pemohon? Halo?

118. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PHP.KOT-XIX/2021: RINTO

Siap.

119. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Jadi sesuai dengan ketentuan Hukum Acara, perbaikan itu hanya pada masa perbaikan. Anda tidak mengambil masa itu, mengajukan Permohonan awal, lalu tidak ada perbaikan, kan? Di sidang hari ini, tidak ada lagi perbaikan substantif. Ini untuk kepastian mereka juga yang pihak lain. Kalau Anda mau menyampaikan, silakan, tapi posisi Hukum Acaranya begitu.

120. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PHP.KOT-XIX/2021: RINTO

Baik.

121. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Nanti kami akan menilai, apa yang Saudara sampaikan. Begitu saja, Pak Ketua. Terima kasih.

122. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, baik. Silakan, pokok-pokoknya saja!

123. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PHP.KOT-XIX/2021: RINTO

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Sebelumnya, mohon izin perkenankan kepada saya, Rinto, Yang Mulia, untuk membacakan Permohonan yang sebelumnya telah kami daftarkan dan telah teregister di Mahkamah Konstitusi.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi (...)

124. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tidak usah dibaca, dianggap dibacakan.

125. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PHP.KOT-XIX/2021: RINTO

Baik, Yang Mulia.

126. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Identitasnya Pemohon saja, mulai dari situ.

127. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PHP.KOT-XIX/2021: RINTO

Yang bertanda tangan di bawah ini, nama Muhammad Amran Agus. Kedua, ada Adi Dharma Wiranata. Ketiga, Muhammad Rizal Fadillah. Keempat (...)

128. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Dan kawan-kawan, begitu saja (...)

129. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PHP.KOT-XIX/2021: RINTO

Zulkifli.

130. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Enggak usah dibacakan.

131. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PHP.KOT-XIX/2021: RINTO

Dan kawan-kawan, Yang Mulia. Adalah kesemuanya merupakan Pemantau Pemilihan Wali Kota Balikpapan Tahun 2020. Berdasarkan SK KIPP Provinsi Nomor 16/Kep/KIPP-Kaltim/1 (...)

132. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Itu di ... anu ... kalau membaca kayak begitu (...)

133. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PHP.KOT-XIX/2021: RINTO

Dan (...)

134. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Nomor 16 dan seterusnya Tahun 2020, gitu.

135. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PHP.KOT-XIX/2021: RINTO

Baik, Yang Mulia.

136. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

137. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PHP.KOT-XIX/2021: RINTO

Nomor 16 dan seterusnya Tahun 2020, selanjutnya disebut sebagai Pemohon. Terhadap Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman dan seterusnya, disebut sebagai Termohon.

Dalam hal ini, mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor 263 dan seterusnya Tahun 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020, yang diumumkan pada hari Kamis, tanggal 16 Desember 2020, pukul 14.23 WITA.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Kami harap dianggap dibacakan, Yang Mulia.

138. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Dianggap dibacakan, ya.

139. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PHP.KOT-XIX/2021: RINTO

Yang kedua, Kewenangan Hukum Pemohon. Kami anggap juga dibacakan.

140. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

141. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PHP.KOT-XIX/2021: RINTO

Tenggang waktu ... ketiga, tenggang waktu pengajuan Permohonan. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Pilkada juncto Pasal 7 PMK Nomor 6 Tahun 2020 yang pada pokoknya menyatakan, "Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 hari ... hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Provinsi, Kota, dan seterusnya."

B. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor 263 dan seterusnya Tahun 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020, yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020. Selanjutnya, kami anggap dibacakan.

142. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

143. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PHP.KOT-XIX/2021: RINTO

Kami langsung masuk di poin 4, Pokok Permohonan.

A. Tentang Termohon dan Bawaslu yang tidak menerapkan prinsip perlakuan yang sama di hadapan hukum atau equality before the law dan diskriminasi:

1. Bahwa sebelumnya menyampaikan pokok-pokok Permohonan ... Permohonan dengan segala hormat ingin terlebih dahulu menyam ... Pemohon dengan ... maaf, kami ulangi ... Pemohon dengan segala hormat ingin terlebih dahulu menyampaikan beberapa hal terkait dengan penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020 yang menganut ... yang menurut Pemohon terdapat beberapa hal yang melanggar asas pelaksanaan pemilihan.
2. Bahwa Undang-Undang Pilkada telah dengan tegas mengatur jika asas pelaksanaan pilkada, yakni Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia, Jujur, dan Adil.
3. Bahwa sejatinya, demokrasi yang dilakukan melalui mekanisme pemilihan kepala daerah adalah wujud dari kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat yang demikian itu, tentu tidak boleh dicerai dengan memperlakukan pihak-pihak dalam pemilihan kepala daerah in casu adalah Pemohon sebagai pemantau Pemilihan Wali Kota dan Wakil

Wali Kota Balikpapan Tahun 2020, dengan perlakuan yang tidak adil atau tidak setara.

4. Bahwa perlakuan yang tidak adil dan tidak setara adalah wujud dari penyimpangan terhadap demokrasi yang tidak hanya mencederai kedaulatan rakyat, tapi juga menyebabkan proses dan hasil dari pesta demokrasi berupa pemilihan kepada ... kepala daerah tidak memiliki integritas, proses, dan hasil.
5. Bahwa Pemohon berpendapat, KPU Kota Balikpapan telah berperilaku tidak adil kepada Pemohon dalam pelaksanaan Pemilihan Wali Kota Balikpapan Tahun 2020.
6. Bahwa perlakuan tidak adil tersebut pada Pemohon, jelas sebagai berikut.
 - a. Bahwa Pemohon telah melaporkan kampanye melalui media sosial dan Instagram, dan medsos kepada Bawaslu pada tanggal 11 November 2020. Akan tetapi Bawaslu tidak menindaklanjuti laporan atau aduan Pemohon terkait akun media sosial yang tidak mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan. Hal ini dikarenakan (...)

144. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Supaya lebih cepat, ringkas, itu begini bisa dibagi yang Anda bacakan diringkas.

145. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PHP.KOT-XIX/2021: RINTO

Baik, Yang Mulia.

146. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Itu siapa ... menyangkut siapa? Ini tadi yang terakhir Anda bacakan, itu kan kesalahannya ada di Bawaslu, ya?

147. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PHP.KOT-XIX/2021: RINTO

Baik, Yang Mulia.

148. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terus kalau ... anu ... bisa dibuat 2, ringkas. Ini apa yang dilakukan oleh Termohon? Termohon apa? Kurang apa? Bertentangan dengan peraturan perundangannya, di mana?

Kemudian Yang kedua, nanti setelah itu Pihak Terkait. Yang menang itu ... itu kesalahannya, apa? Terus yang Bawaslu, itu kesalahannya, apa? Begitu.

149. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PHP.KOT-XIX/2021: RINTO

Baik.

150. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Jangan dibacakan keseluruhan begitu, nanti terlalu lama.

151. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PHP.KOT-XIX/2021: RINTO

Baik, Yang Mulia.

152. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya? Pokok-pokoknya saja. Ini sudah ... kalau dibacakan gitu kita sudah punya semua ini.

153. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PHP.KOT-XIX/2021: RINTO

Baik ... baik, Yang Mulia.
Mohon izin, Yang Mulia, untuk melanjutkan.

154. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Anda mempersoalkan yang terakhir itu, Bawaslu?

155. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PHP.KOT-XIX/2021: RINTO

Ya.

156. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terus, siapa lagi yang salah?

157. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PHP.KOT-XIX/2021: RINTO

Yang Mulia, izin menyampaikan yang poin c, Yang Mulia (...)

158. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, silakan!

159. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PHP.KOT-XIX/2021: RINTO

Karena berkaitan dengan renvoi.

160. KETUA: ARIEF HIDAYAT

He eh.

161. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PHP.KOT-XIX/2021: RINTO

Bahwa Pemohon pada tanggal 9 Desember 2020 diperlakukan tidak adil karena Pemohon tidak diberikan hak untuk berbicara dalam pleno tingkat kecamatan. Selain itu, Pemohon tidak diberikan hasil Form C-KWK oleh TPS Telaga Sari (...)

162. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Nah, ini nanti Termohon yang bereaksi ini, ya? Bagaimana ini? Terus!

163. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PHP.KOT-XIX/2021: RINTO

Dan Klandasan Ilir dan (...)

164. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, itu sudah dianggap dibacakan.

165. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PHP.KOT-XIX/2021: RINTO

Seterusnya ... baik.

Yang Mulia, yang pada poin c inilah yang kami renvoi. Sebenarnya tidak banyak, hanya di ketentuan yang sebelumnya itu *Balikpapan Barat* tertulis di sana, lembar ke-5 baris ke-2 paling atas. Nah, yang direnvoi kami itu kami hilangkan *Balikpapan Barat*-nya. Itu renvoi yang pertama.

166. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

167. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PHP.KOT-XIX/2021: RINTO

Baik. Izin melanjutkan, Yang Mulia.

168. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Jadi, *PPK Balikpapan Barat* itu yang dicoret?

169. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PHP.KOT-XIX/2021: RINTO

Ya, benar, Yang Mulia.

170. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

171. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PHP.KOT-XIX/2021: RINTO

Berkaitan dengan itu. Oke. Mohon izin, Yang Mulia, dilanjutkan oleh rekan saya Zulkifli untuk membaca hingga selesai.
Terima kasih.

172. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PHP.KOT-XIX/2021: ZULKIFLI

Mohon izin, Yang Mulia, saya lanjutkan. Selanjutnya, pada poin d. Bahwa Pemohon pada tanggal 10 Desember, kembali melaporkan akun media sosial yang me-posting kegiatan pencoblosan di bilik suara. Kami melaporkan kepada Pihak Bawaslu.

Selanjutnya bagian e. Bahwa terhadap apa yang Pemohon uraikan tersebut di atas, maka jelas bagi kami, Pemohon menyatakan bahwasanya Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020 bersikap diskriminasi dan tidak adil.

173. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Jadi, itu yang dianggap (...)

174. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PHP.KOT-XIX/2021: ZULKIFLI

Selanjutnya bagian b. Bahwa menurut Pemohon, selisih perolehan suara disebabkan Pemohon tidak optimalisasi dalam melakukan sosialisasi (...)

175. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

176. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PHP.KOT-XIX/2021: ZULKIFLI

Pemilihan (...)

177. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke, bagian b. Ya, sampai situ saja. Termohon (...)

178. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PHP.KOT-XIX/2021: ZULKIFLI

Selanjutnya, Yang Mulia (...)

179. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tidak optimal melakukan sosialisasi.

180. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PHP.KOT-XIX/2021: ZULKIFLI

Oh, ya. Terima kasih, Yang Mulia. Selanjutnya, kami masuk pada Petitem.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas (...)

181. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sekarang pertanyaan saya, apakah dengan tidak melakukan sosialisasi, itu berpengaruh kepada partisipasi?

182. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PHP.KOT-XIX/2021: ZULKIFLI

Kalau berdasarkan perspektif kami, Yang Mulia, itu berpengaruh, Yang Mulia.

183. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Berpengaruh?

184. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PHP.KOT-XIX/2021: ZULKIFLI

Ya.

185. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Partisipasi publik di sana yang ikut pemilihan, berapa?

186. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PHP.KOT-XIX/2021: ZULKIFLI

Kalau berdasarkan data itu sekitar 60%, Yang Mulia.

187. KETUA: ARIEF HIDAYAT

60% yang memilih?

188. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PHP.KOT-XIX/2021: ZULKIFLI

Ya.

189. KETUA: ARIEF HIDAYAT

60% itu terus memilih siapa? Memilih kotak kosong atau memilih Pihak Terkait?

190. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PHP.KOT-XIX/2021: ZULKIFLI

60% itu terbagi, Yang Mulia. Ada yang memilih Pihak Terkait, ada yang memilih kotak kosong.

191. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Nah, kira-kira menang mana?

192. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PHP.KOT-XIX/2021: ZULKIFLI

Kotak kosong ... apa ... Pihak Terkait, Yang Mulia.

193. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Nah, ya. Kalau begitu, kan kita tidak tahu.

194. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PHP.KOT-XIX/2021: ZULKIFLI

Ya.

195. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

196. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PHP.KOT-XIX/2021: ZULKIFLI

Ya, Yang Mulia.

197. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Jadi, itu namanya dalil-dalil yang kemudian bisa bias kalau begitu itu. Ya, terus dilanjutkan!

198. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PHP.KOT-XIX/2021: ZULKIFLI

Selanjutnya, Yang Mulia, kami masuk kepada Petitum.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Balikpapan Nomor 263 dan seterusnya tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara.
3. Menetapkan bahwa perolehan suara hasil Pemilihan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan Tahun 2020 tidak sah.

4. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini atau mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
5. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 263 dan seterusnya.
3. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini.
Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.
Terima kasih, Yang Mulia.

199. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Yang Mulia Pak Manahan, ada? Silakan!

200. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Kepada Pemohon, di sini yang maju di persidangan ini, kan ada sampai 9. Apakah semuanya ini pemantau?

201. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PHP.KOT-XIX/2021: RINTO

Benar, Yang Mulia.

202. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik.

203. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PHP.KOT-XIX/2021: RINTO

Semuanya pemantau.

204. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Pemantau. Apakah ada susunan organisasi dari pemantau ini? Misalnya ada ketuanya, ada sekjennya, atau ada anggota, seperti itu?

205. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PHP.KOT-XIX/2021: RINTO

Benar, Yang Mulia. Ada strukturnya.

206. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ada strukturnya? Berarti itu dijadikan bukti, ya?

207. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PHP.KOT-XIX/2021: RINTO

Baik.

208. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Nah, supaya kita mengerti, bagaimana susunan organisasi dari pemantau ini? Sekaligus juga tadi sertifikat sudah disebut di sini. Ada itu, ya?

209. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PHP.KOT-XIX/2021: RINTO

Ada, Yang Mulia.

210. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Jadi barang bukti.
Cukup, Yang Mulia. Itu saja

211. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Prof. Saldi, ada? Silakan!

212. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ini masih ada kaitan dengan yang sebelumnya ini. Ini ada 9 nama, kami tidak bisa memastikan itu semuanya anggota KIPP atau tidak, ya karena tidak ada lampirannya. Jadi, harusnya itu ada lampiran. Satu.

Yang kedua, ada lampiran anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi Anda? Ada, enggak?

213. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PHP.KOT-XIX/2021: RINTO

Lampirannya kami belum bawa, Yang Mulia.

214. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Bukan. Pertanyaan saya, ada atau tidak?

215. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PHP.KOT-XIX/2021: RINTO

Mohon izin ... mohon izin, Yang Mulia. Bahwa untuk AD/ART-nya ada, tetapi memang mengikuti AD/ART KIPP Pusat.

216. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke. Nanti kami cek itu.

217. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PHP.KOT-XIX/2021: RINTO

Baik, Yang Mulia.

218. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Tapi, kan kami tidak tahu, apakah kami harus ke KIPP Pusat untuk dapat itu? Itu kan tidak bisa, ya? Anda paham maksud saya, kan?

219. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PHP.KOT-XIX/2021: RINTO

Paham, Yang Mulia.

220. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Itu ... jadi itu. Yang kedua, ini ada 9 nama, tapi hanya diwakili oleh satu KTP, ya, kan?

221. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Yang tanda tangan juga hanya dua.

222. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Yang tanda tangan juga hanya dua. Jadi, ini nanti klarifikasi berikutnya, Pak Ketua.

223. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

224. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ada 9 nama, tapi tiba-tiba yang tanda tangani hanya dua orang. Atas hak apa dua orang ini bisa mewakili 9? Nah, itu kita tidak bisa mengetahui di Mahkamah.

Terima kasih, Pak Ketua.

225. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PHP.KOT-XIX/2021: RINTO

Baik.

226. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, itu, ya. Mestinya kalau Pemohonnya 9, yang tanda tangan juga 9, otomatis itu. Kecuali 9 orang yang menjadi prinsipal ini memberi kuasa kepada dua orang ini untuk mengajukan Permohonan, ya? Jadi, diklirkan itu.

227. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PHP.KOT-XIX/2021: RINTO

Mohon izin, Yang Mulia.

228. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

229. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PHP.KOT-XIX/2021: RINTO

Sedikit menjelaskan. Bahwa dua orang yang bertanda tangan di situ adalah ketua dan sekretaris umum kami.

230. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, kalau begitu, begini, Organisasi KIPP enggak usah ada nama 9 orang ini.

231. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PHP.KOT-XIX/2021: RINTO

Oh, baik, Yang Mulia. Akan kami (...)

232. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tapi, ini sudah terlanjur begini, ya?

233. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PHP.KOT-XIX/2021: RINTO

Baik.

234. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, nanti kita nilai.

Baik, ada lagi yang akan disampaikan? Cukup?

235. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PHP.KOT-XIX/2021: RINTO

Cukup, Yang Mulia.

236. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Saudara mengajukan bukti, sudah ada buktinya?

237. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PHP.KOT-XIX/2021: RINTO

Ada, Yang Mulia.

238. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Nanti sudah ada rekapitulasi di sini tentang buktinya. Baik, terima kasih Pemohon Perkara Nomor 62/PHP.KOT-XIX/2021.

Sekarang berikutnya, Perkara Nomor 75/PHP.BUP-XIX/2021, saya persilakan!

Jadi kalau bisa, nanti pada waktu mau mengemukakan dalilnya, dalil itu kesalahan yang ditujukan kepada siapa? Kepada Termohon, pertama kali kan mesti kepada Termohon? Terus, apakah ada kaitannya dengan Bawaslu? Apakah ada kesalahan yang dilakukan oleh Pihak Terkait? Misalnya, kalau Pihak Terkait itu berhubungan dengan money politics, ya, kalau Termohon melaksanakannya enggak benar. Itu kemudian, Bawaslu sudah dilaporkan, tapi Bawaslu diam saja, itu kepada Bawaslu. Jadi, yang sistematis begitu, ya. Silakan!

239. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PHP.BUP-XIX/2021: MOH. MAULANA

Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan, Yang Mulia.

Sebelumnya kami mau konfirmasi, Yang Mulia. Bahwa materi Permohonan yang akan kami bacakan itu adalah berkaitan dengan materi Perbaikan Permohonan yang telah kami serahkan tanggal 6 Januari 2021, Yang Mulia.

240. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Ini begini, Saudara mengajukan Permohonan kapan?

241. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PHP.BUP-XIX/2021: MOH. MAULANA

Permohonan kami tanggal 20 Desember (...)

242. KETUA: ARIEF HIDAYAT

20 Desember 2020. Jadi, masih memenuhi tenggang waktu karena batasnya 23, kan? Tapi perbaikannya kapan Anda ajukan?

243. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PHP.BUP-XIX/2021: MOH. MAULANA

Perbaikan kami ajukan 6 Januari 2021.

244. KETUA: ARIEF HIDAYAT

6 Januari. Perbaikan mestinya 23 ditambah 3. Ini tapi 6 Januari?

245. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PHP.BUP-XIX/2021: MOH. MAULANA

Ya, Yang Mulia.

246. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Itu sesuai dengan PMK yang dipakai adalah perbaikan awal. Karena perbaikannya tidak bisa digunakan dalam pemeriksaan perkara ini karena perbaikan sudah lewat tenggang waktu, ya.

Jadi Saudara terserah, kalau Anda membacakan perbaikannya itu, padahal kita yang pakai adalah permohonan awal, gitu. Ya, kan sudah lewat waktu, kan? Coba, 6 Januari lewatnya sudah panjang, ya, kan?

Coba, nanti kalau ... anu ... dibaca di PMK kita Tahun 2020, jelas sekali itu, ya?

247. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PHP.BUP-XIX/2021: MOH. MAULANA

Ya, kemarin kami menunggu koreksi terhadap dokumen yang kami telah masukkan secara daring, Yang Mulia. Tapi dalam rentang waktu pascalewatnya 3 hari tersebut, perbaikan terhadap materi Permohonan yang kami telah setorkan secara daring tersebut, kami tidak kunjung menerima, Yang Mulia.

248. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Loh, enggak ada perbaikan. Siapa yang perbaiki?

249. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PHP.BUP-XIX/2021: MOH. MAULANA

Konfirmasi, mohon (...)

250. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Enggak ada konfirmasi. Begitu Anda pokoknya mengajukan Permohonan, itu Anda diberi kesempatan oleh MK memperbaiki Permohonan. Lah perbaikannya kayak apa, terserah Anda. Bukan kita mengoreksi macam-macam, baru Anda memperbaiki sesuai dengan petunjuk kita, bukan begitu yang dimaksud.

251. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PHP.BUP-XIX/2021: MOH. MAULANA

Dokumen yang kami telah setorkan secara daring kemarin, Yang Mulia.

252. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Jadi, Anda jangan salah pengertian.

253. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PHP.BUP-XIX/2021: MOH. MAULANA

Siap, baik, Yang Mulia.

254. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Waktu 3x24 jam perbaikan itu, artinya Anda merasa belum puas atas Permohonan awal. Bukan itu dikoreksi oleh Mahkamah, kemudian Anda harus memperbaiki ini, ini, ini, bukan. Lah kalau begitu, kan Mahkamah condong ke arah memihak Pemohon, bukan berada di tengah, kan gitu, ya?

255. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PHP.BUP-XIX/2021: MOH. MAULANA

Siap, Yang Mulia. Fokus kami adalah kelengkapan dokumen, Yang Mulia, yang kami setorkan secara daring. Mohon izin (...)

256. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, disetorkan secara daring juga enggak masalah, kita akui.

257. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PHP.BUP-XIX/2021: MOH. MAULANA

Ya, mohon izin, Yang Mulia. Jika diperkenankan, Yang Mulia. Kami hendak membacakan materi Permohonan yang telah kami koreksi, Yang Mulia. Sebab dalam materi yang telah kami koreksi tersebut, itu juga berkaitan dengan angka, Yang Mulia.

258. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Loh ya, tapi kan sudah lewat.

259. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PHP.BUP-XIX/2021: MOH. MAULANA

Yang sebelumnya, ya (...)

260. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Bukan sud ... bukan masalah itu, sudah lewat perbaikannya.

261. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PHP.BUP-XIX/2021: MOH. MAULANA

Baik.

262. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Jadi kita ... kalau Anda bacakan atau Anda sampaikan, silakan saja. Pastikan ini kita nilai, dan diiyakan, dan direspons oleh mereka.

263. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PHP.BUP-XIX/2021: MOH. MAULANA

Ya.

264. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Bahwa Permohonan Anda yang itu sudah lewat waktu, ya?

265. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PHP.BUP-XIX/2021: MOH. MAULANA

Ya. Mohon izin untuk bisa membacakan perbaikan itu, Yang Mulia.

266. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, silakan, Prof!

267. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ini Pemohon, ya?

268. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PHP.BUP-XIX/2021: MOH. MAULANA

Ya.

269. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ini kan yang ... karena ini kan multipihak, ya. Ada Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, pemberi keterangan. Kenapa dibuat waktu sedemikian ketat? Agar semua orang ini punya kepastian. Anda diberi waktu untuk mengajukan Permohonan ada batasnya, ada waktu untuk memperbaiki Permohonan ada batasnya agar orang-orang ini juga pasti. Kalau Anda diberi waktu untuk mengajukan Permohonan dan tidak menyampaikan, kemudian tidak diikuti Perbaikan Permohonan. Maka, yang dianggap sebagai Permohonan itu adalah Permohonan yang Saudara ajukan awal.

Nah, itu nanti yang akan direspons oleh Termohon, Pihak Terkait, pemberi keterangan. Nah itu. Jadi, kalau Anda pun menyampaikan yang

Anda katakan tadi di ... apa ... disesuaikan, diperbaiki, mereka tetap saja akan sesuai dengan Hukum Acara akan merespons apa yang ada di Permohonan awal itu yang tidak Anda perbaiki, gitu.

Jadi ini perlu agar jangan nanti Anda menciptakan ketidakadilan dalam proses ini, menciptakan ketidakpastian. Jadi, baiknya Anda sampaikan saja Permohonan awal itu karena itu yang akan direspons, Mahkamah juga akan mempertimbangkan itu.

Terima kasih, Pak Ketua.

270. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Jelas, ya? Jadi itu, nanti Anda enggak direspons. Jadi begini, Permohonan yang Anda sampaikan itu pertama adalah ini. Permohonan yang pertama ... sebentar, ini supaya jelas, gitu untuk semua pihak. Ini Permohonan Anda itu yang pertama ini?

271. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PHP.BUP-XIX/2021: MOH. MAULANA

Ya, benar, Yang Mulia.

272. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, kan? Yang diketahui oleh mereka semua, pihak yang lain adalah ini. Lah, Anda sekarang mengajukan Perbaikan Permohonan setebal kayak begini. Sekarang memang ini disampaikan di sini, ini sudah lewat tenggang waktu. Nanti para pihak itu merespons Permohonan yang ini saja. Karena memang menurut Hukum Acara, Mahkamah Konstitusi ini sudah enggak berlaku, gitu lho. Nah, kalau Anda mau membacakan ini, ya, silakan saja, tapi nanti yang ditanggapi oleh mereka, ini. Termasuk Hakim nanti yang menilai, yang dipakai ... kita kan berdasarkan mengadili, memeriksa berdasarkan Hukum Acara, "Oh, yang dipakai adalah Permohonan ini karena yang ini sudah lewat tenggang waktu," gitu lho. Ini perubahannya sangat substansial dan ini sudah lewat tenggang waktu tanggal 6, jauh sekali, begitu, ya.

Bagaimana? Silakan!

273. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PHP.BUP-XIX/2021: MOH. MAULANA

Baik, Yang Mulia. Jika seperti itu petunjuknya, Yang Mulia, kami akan membacakan Pokok-Pokok Permohonan awal yang menurut kami proses perubahan dari Permohonan awal dan juga perbaikan yang telah kami ajukan secara luring, Yang Mulia, di Mahkamah Konstitusi pada

tanggal 6 Januari tersebut perubahannya hanya berkaitan dengan perubahan angka-angka, Yang Mulia.

274. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, sudah, silakan! Silakan saja! Pokok-pokoknya yang mau Anda bacakan yang mana? Jadi, nanti (...)

275. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PHP.BUP-XIX/2021: MOH. MAULANA

Baik, maksudnya ... ya, menurut kami berkaitan dengan pokok-pokok substansial selain dari angka-angka tersebut tidak ada perubahan, Yang Mulia.

276. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ayo, silakan!

277. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PHP.BUP-XIX/2021: MOH. MAULANA

Baik, terima kasih atas kesempatannya, Yang Mulia.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konsitusi, yang bertanda tangan di bawah ini H.M. Jusuf Rizal alias Muhammad Jusuf, yang dalam hal ini adalah bertindak dalam kapasitas dan kedudukannya sebagai Presiden LSM LIRA (Lambung Informasi Rakyat Indonesia). Dan pada tanggal 19 Desember 2020 telah memberikan kuasa kepada kami, Moh. Maulana dan rekan-rekan, yang kesemuanya merupakan advokat pada Kantor Batara Justitia and Legal Consult (...)

278. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, itu dianggap dibacakan.

279. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PHP.BUP-XIX/2021: MOH. MAULANA

Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Baik, berkenaan dengan hal tersebut, Yang Mulia. Perkenankan kami membacakan Pokok-Pokok Permohonan.

280. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

281. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PHP.BUP-XIX/2021: MOH. MAULANA

Bahwa pada prinsipnya, pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota, yang selanjutnya disebut pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota secara langsung dan demokratis.

Baik. Bahwa diketahui dalam kaitan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang berlangsung di Kabupaten Kutai Kartanegara. Suara yang diperoleh oleh calon tunggal yang ditetapkan oleh Termohon bukan merupakan cerminan dari aspirasi dan kedaulatan rakyat, tetapi karena berkuasanya kekuatan oligarki dengan kartel politiknya melalui kekuasaan yang dimilikinya disertai dengan kekuatan finansialnya telah melakukan segala cara kotor demi melanggengkan kekuasaannya dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Bahwa penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang berlangsung di Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan begitu banyaknya pelanggaran dan tindak kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang bermuara pada implikasi pelaksanaan penyelenggaraan (...)

282. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Itu yang dibaca poin berapa itu?

283. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PHP.BUP-XIX/2021: MOH. MAULANA

Serta memiliki (...)

284. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Mas! Pak!

285. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PHP.BUP-XIX/2021: MOH. MAULANA

Kaitan langsung dan (...)

286. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Itu yang dibaca poin berapa itu?

287. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PHP.BUP-XIX/2021: MOH. MAULANA

Poin (...)

288. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Itu kan ada nomornya poin berapa, poin berapa itu? Ha? Ini di Permohonan Anda enggak ada halamannya, terus objeknya masih kosong semua.

289. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PHP.BUP-XIX/2021: MOH. MAULANA

Ini masuk di dalam poin A, Yang Mulia. Fakta dan jenis pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif.

290. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Itu pokok-pokoknya saja, jangan dibaca seluruhnya.

291. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PHP.BUP-XIX/2021: MOH. MAULANA

Ya, mulai dari situ, Yang Mulia. Kami berangkat mulai dari situ, Yang Mulia.

292. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, itu poin A, berarti 11 itu ... nomor 11?

293. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PHP.BUP-XIX/2021: MOH. MAULANA

11, Yang Mulia.

294. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Pelanggaran TSM terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu?

295. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PHP.BUP-XIX/2021: MOH. MAULANA

Ya, siap, Yang Mulia.

296. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terus poin B, ya?

297. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PHP.BUP-XIX/2021: MOH. MAULANA

Ya.

298. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sekarang dibacakan saja poin A berkenaan dengan apa?

299. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PHP.BUP-XIX/2021: MOH. MAULANA

Baik, Yang Mulia. Kami lanjut, Yang Mulia.

300. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

301. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PHP.BUP-XIX/2021: MOH. MAULANA

Pelanggaran terstruktur dalam penjejalan bakal pasangan calon independen.

Bahwa dalam kedudukannya sebagai petahana, calon tunggal dalam Pemilihan Kepala Daerah Kutai Kartanegara Edi Damansyah dan Rendi Solihin dengan kekuatan finansial dan kekuatan politiknya merangkul hampir seluruh dukungan partai politik pengusung yang memiliki kursi di DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara.

302. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

303. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PHP.BUP-XIX/2021: MOH. MAULANA

Bahwa sementara kandidat yang menempuh jalur perseorangan Gufron Yusuf-Ida Prahastuty, dan Edi Subandi dan Junaidi telah secara terstruktur dan sistematis digagalkan syarat kualifikasi dukungan perseorangan oleh sebab jumlah dukungan untuk dua bakal pasangan calon perseorangan pada Pilkada Kukar 2020 tersebut belum memenuhi

syarat jumlah keseluruhan dukungan sebanyak 41.273, dengan klasifikasi untuk dukungan Bakal Pasangan Calon Edi Subandi dan Junaidi yang memenuhi syarat sebanyak 23.743, serta Bakal Pasangan Calon Ghufron Yusuf dan Ida Prahastuty yang memenuhi syarat hanya 21.054.

Bahwa dalam keterangan persnya sebagaimana (...)

304. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, ini sudah enggak usah. Ini dianggap dibacakan. Semuanya (...)

305. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PHP.BUP-XIX/2021: MOH. MAULANA

Ya. Bahwa sikap Termohon tersebut ... baik.

Selanjutnya, Yang Mulia. Bahwa sikap Termohon tersebut tentulah mengada-ada, tidak masuk akal (...)

306. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, itu juga tidak usah, itu dianggap dibacakan.

Jadi begini loh, ada pelanggaran terstruktur dalam penjejalan bakal pasangan calon. Itu satu penjejalan, itu saja. Narasinya dijelaskan 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Terus B, pelanggaran terstruktur, sistematis penjejalan bakal calon ... Pasangan Calon Awang dan sebagainya. Itu dijelaskan narasinya 1, 2, 3, 4b. Ini kalau dibaca seluruhnya, ya, Anda sendiri (...)

307. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PHP.BUP-XIX/2021: MOH. MAULANA

Baik.

308. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Yang menyampaikan Permohonan Anda, ya?

309. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PHP.BUP-XIX/2021: MOH. MAULANA

Baik, Yang Mulia. Kami lanjutkan (...)

310. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tadi sudah berkali-kali saya katakan.

311. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PHP.BUP-XIX/2021: MOH. MAULANA

Baik. Bahwa pelanggaran secara terstruktur dan sistematis juga terjadi dalam upaya penjejalan Bakal Pasangan Calon Awang Yacoub Luthman dan Suko Buono dalam Pemilihan Bupati Kukar.

Bahwa upaya penjejalan Bakal Pasangan Calon Awang Yacoub Luthman dan Suko Buono dilakukan secara terstruktur dan tersistematis, yang juga turut mengonfirmasi fakta mengenai desain Pemilihan Kepala Daerah Kukar yang hanya diikuti satu pasangan calon.

Bahwa upaya penjejalan Awang Yacoub Luthman dan Suko Buono juga dibuktikan dengan tindakan Termohon yang tidak profesional dan tidak independen dengan melakukan serangkaian tindakan yang secara sengaja menghilangkan hak konstitusional Awang Yacoub Luthman dan Suko Buono.

Bahwa dalam rentang waktu sejak dibukanya masa pendaftaran calon pada hari Jumat, 4 September 2020, terdapat dua bakal pasangan calon yang mendaftar dan memasukkan data dukungan partai politik atau gabungan partai politik untuk mengikuti kontestasi penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Kukar, yaitu Edi Damansyah dan Rendi Solihin serta Awang Yakub Luthman dan Suko Buono.

Pada tanggal 5 September 2020 sebelum masuknya pendaftaran bakal pasangan calon, Bakal Pasangan Calon Awang Yakub Luthman, Suko Buono melalui Kuasa Hukumnya Edy Sumarlin telah mengajukan surat ke Termohon perihal permohonan menolak pihak lain yang mendaftar sebagai pasangan calon dengan menyertakan dukungan Dewan Pimpinan Partai Amanat Nasional, sebagaimana yang telah kami beri pada bukti.

Bahwa Termohon telah melakukan verifikasi persyaratan Bakal Pasangan Calon Edi Damansyah dan Rendi Solihin pada tanggal 4 September 2020 dan menerbitkan Berita Acara terpenuhinya persyaratan Bakal Pasangan Calon Edi Damansyah dan Rendi Solihin tanpa memperhatikan masukan dari masyarakat sebagaimana surat yang telah dikirim oleh Bakal Pasangan Calon Awang Yacoub Luthman dan Suko Buono melalui kuasa hukumnya.

Bahwa setelah dilakukan verifikasi dukungan partai politik tanpa berdasar hukum, Termohon lalu menyatakan menolak berkas permohonan Bakal Pasangan Calon Awang Yacoub Luthman, Suko Buono dengan dalih bahwa syarat pencalonan maupun syarat calon Awang Yacoub Luthman dan Suko Buono belum lengkap. Padahal diketahui, Bakal Pasangan Calon Awang Yacoub Luthman dan Suko Buono telah melengkapi seluruh dokumen persyaratan pencalonan dirinya sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan PKPU Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang

Pencalonan Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Selanjutnya.

312. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Apa itu?

313. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PHP.BUP-XIX/2021: MOH. MAULANA

Perkenankan kami membacakan poin ... poin c, Yang Mulia.

314. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Poin c sekarang?

315. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PHP.BUP-XIX/2021: MOH. MAULANA

Ya.

316. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

317. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PHP.BUP-XIX/2021: MOH. MAULANA

Terjadinya pelanggaran terstruktur dan sistematis yang dilakukan oleh petahana dalam konstestasi pilkada di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Bahwa dalam rentang awal sebelum penyelenggaraan pilkada di Kabupaten Kukar, Edi Damansyah yang merupakan petahana telah melakukan pelanggaran secara terstruktur dan sistematis dengan menyalahgunakan kewenangan serta program pemerintah demi kepentingan dirinya sebagai calon dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang telah direncanakan secara matang dan menggunakan aparatur pemerintah untuk menjalankan programnya. Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan peresmian dan peletakan batu pertama lanjutan pembangunan Jalan Oloy.

Selanjutnya. Bahwa dalam kegiatan tersebut, Edi Damansyah yang dalam kedudukannya sebagai bupati telah memberikan sambutan

kepada peserta dengan ... yang pada pokoknya dianggap dibacakan, Yang Mulia.

318. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

319. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PHP.BUP-XIX/2021: MOH. MAULANA

Bahwa lebih lanjut dalam kegiatan tersebut, Edi Damansyah meminta kepada peserta dalam kegiatan tersebut agar dirinya dimenangkan dalam pilkada yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020.

Bahwa pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif juga dilakukan Edi Damansyah melalui Program Pemerintah Pengentasan dan Pencegahan Stunting yang diselubungi motif politik dengan dugaan penyalahgunaan anggaran Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Bahwa perbuatan terstruktur dan sistematis tersebut dilakukan dalam rentang pada saat Edi Damansyah mulai menjabat sebagai Bupati Kutai Kartanegara pada Tahun 2019 menggantikan Bupati Rita Widyasari yang tersandung kasus korupsi.

Bahwa pada bulan Desember, Edi Damansyah selaku bupati mengeluarkan kebijakan terkait Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yakni Perbup Nomor 72 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Bahwa Perbup Nomor 72 Tahun 2019 tersebut, seluruh pemerintah desa agar memasukkan anggaran sewa kendaraan selama 12 bulan untuk menunjang mobilitas pemerintah desa dalam rangka operasional pemerintahan desa dan mendukung Program Penanganan dan Pencegahan Stunting.

Selanjutnya. Bahwa menindaklanjuti perbup, badan pemerintahan desa (...)

320. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, itu contoh-contoh anunya ... anggarannya. Sekarang poin apa yang ... tadi d, sekarang e.

321. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PHP.BUP-XIX/2021: MOH. MAULANA

Oke, baik, Yang Mulia.

322. KETUA: ARIEF HIDAYAT

 Apa yang e ini? Ini di e, perbuatan money politics dilakukan calon tunggal. Ya, kan?

323. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PHP.BUP-XIX/2021: MOH. MAULANA

 Ya.

324. KETUA: ARIEF HIDAYAT

 Perbuatan money politics? Money politics-nya, gimana? Saya tuntun saja biar anu ... enggak baca.

325. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PHP.BUP-XIX/2021: MOH. MAULANA

 Sebelum ... ya, sebelum itu, Yang Mulia, kami masuk di bagian pokok pelanggaran Pasal 71 di dalam poin (...)

326. KETUA: ARIEF HIDAYAT

 Pokok apa?

327. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PHP.BUP-XIX/2021: MOH. MAULANA

 Poin uraian mengenai ... ya, poin 48, Yang Mulia.

328. KETUA: ARIEF HIDAYAT

 48? Mana, di sini enggak ada 48. "48, Bawaslu ... perbuatan ini termasuk telah ditindaklanjuti Bawaslu," itu?

329. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PHP.BUP-XIX/2021: MOH. MAULANA

 Ya.

330. KETUA: ARIEF HIDAYAT

 Ya, coba apa yang ingin disampaikan?

331. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PHP.BUP-XIX/2021: MOH. MAULANA

Bahwa atas perbuatan Edi Damansyah, Bawaslu RI telah menindaklanjuti laporan masyarakat dengan Register Nomor 013 sekian-sekian, dengan status laporan sebagaimana yang telah buktikan dan menyatakan bahwa terlapor, Calon Bupati Kutai Kartanegara atas nama Edi Damansyah terbukti melakukan pelanggaran Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020.

Poin b. Dalam rekomendasi Bawaslu tersebut, Bawaslu merekomendasikan kepada KPU Kukar melalui KPU RI untuk membatalkan Calon Bupati Kutai Kartanegara atas Edi Damansyah sebagai Calon Bupati Kutai Kartanegara.

Selanjutnya. Bahwa setelah rekomendasi atas hasil penindakan pelanggaran yang dilakukan oleh Bawaslu RI tersebut diterbitkan, Termohon mengambil sikap melawan hukum dengan menolak melaksanakan rekomendasi Bawaslu tersebut (...)

332. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, ini pada intinya sudah dibacakan, ya. Itu Bawaslu nanti merespons. Betul enggak ini, ya, apa yang disampaikan? Terus?

333. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PHP.BUP-XIX/2021: MOH. MAULANA

Baik, Yang Mulia, kami masuk dalam poin politisasi birokrasi dan intimidasi.

334. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Apa ... apa sih bentuknya politi ... enggak usah dibacakan.

335. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PHP.BUP-XIX/2021: MOH. MAULANA

Ya, politisasi birokrasi yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif sebagaimana diurai dalam poin sebelumnya juga pelibatan ASN di semua tingkatan, khususnya camat, lurah, desa, hingga RT yang dilakukan secara tersistematis karena terencana dengan matang (...)

336. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, ya, ini pelibatan ASN.

337. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PHP.BUP-XIX/2021: MOH. MAULANA

Pelibatan ASN.

338. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Kemudian, apa lagi?

339. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PHP.BUP-XIX/2021: MOH. MAULANA

Selanjutnya, kaitan dengan perbuatan money politics, Yang Mulia.

340. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Money politics. Siapa yang melakukan money politics?

341. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PHP.BUP-XIX/2021: MOH. MAULANA

Calon tunggal, Yang Mulia.

342. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Apa dia melakukan sendiri si siapa ... Edi Damansyah?

343. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PHP.BUP-XIX/2021: MOH. MAULANA

Ya, Yang Mulia.

344. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Calon tunggal itu, calon tunggal siapa? Edi Damansyah dan pasangannya melakukan money politics?

345. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PHP.BUP-XIX/2021: MOH. MAULANA

Ya.

346. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Dilaporkan ke Bawaslu?

347. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PHP.BUP-XIX/2021: MOH. MAULANA

Ya.

348. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Dilaporkan ke Gakkumdu?

349. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PHP.BUP-XIX/2021: MOH. MAULANA

Kaitan dengan money politics tersebut, kami belum melaporkan itu, Yang Mulia. Kami belum menemui data ataupun informasi sekaitan dengan laporan (...)

350. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Eenggak, money politics-nya di mana dan siapa yang tahu?

351. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PHP.BUP-XIX/2021: MOH. MAULANA

Baik, Yang Mulia.

352. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Lah, kalau sebelum dilaporkan, kok dianukan di sini?

353. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PHP.BUP-XIX/2021: MOH. MAULANA

Baik, Yang Mulia. Kaitan dengan money politics tersebut, itu tertuang di dalam visi dan misi Pasangan Calon Edi Damansyah dan Rendi Solihin tersebut, Yang Mulia.

354. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Nah, kalau itu tidak dilaksanakan di dalam visi/misi. Apa betul itu dilaksanakan konkretnya?

355. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PHP.BUP-XIX/2021: MOH. MAULANA

Ya, yang dalam tafsir kami, Yang Mulia. Bahwa janji Rp50.000.000,00 yang tertuang dalam visi/misi tersebut (...)

356. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Janji kepada ... Rp50.000.000,00 mau diberikan kepada siapa?

357. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PHP.BUP-XIX/2021: MOH. MAULANA

Diberikan kepada RT, Yang Mulia.

358. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Kepada RT, bantuan itu. Apakah itu sudah termasuk anggaran APBD yang sudah disetujui DPRD atau belum? Nanti tolong direspons, Pihak Terkait, itu.

359. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PHP.BUP-XIX/2021: MOH. MAULANA

Ya.

360. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Kalau itu merupakan ... memang merupakan program dari pemerintah daerah, ya, itu bukan janji. Itu memang (...)

361. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PHP.BUP-XIX/2021: MOH. MAULANA

Bukan program, Yang Mulia, dari pemerintah daerah (...)

362. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Apa lagi money politics-nya?

363. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PHP.BUP-XIX/2021: MOH. MAULANA

Ya. Itu menurut kami, Yang Mulia. Jadi, selain janji Rp50.000.000,00 tersebut, dalam visi/misi Edi ... Edi Damansyah dan

Rendi Solihin juga menjanjikan Rp100.000.000,00 bagi pesantren, Yang Mulia. Yang di dalam fakta yang kami urai kaitan dengan money politics tersebut, janji politik ataupun Rp50.000.000,00 yang tertuang dalam visi/misi tersebut, itu digunakan sebagai sarana untuk memenangkan dirinya.

364. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

365. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PHP.BUP-XIX/2021: MOH. MAULANA

Sarana sosialisasi yang dilakukan dalam setiap kampanye yang dilakukan oleh Edi Damansyah dan Rendi Solihin.

366. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, nanti direspons itu, Pihak Terkait.

367. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PHP.BUP-XIX/2021: MOH. MAULANA

Ya.

368. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terus, apa lagi?

369. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PHP.BUP-XIX/2021: MOH. MAULANA

Langsung masuk ke dalam Petitem, Yang Mulia. Yang menurut kami, seluruh Pokok Permohonan tersebut kami telah terangkan pokok-pokoknya, Yang Mulia.

370. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Di dalam Permohonan Saudara, ada Petitemnya?

371. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PHP.BUP-XIX/2021: MOH. MAULANA

Ada, Yang Mulia.

372. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Di mana Petitumnya? Ini di tempat saya, kok enggak ada Petitumnya? Yang terakhir? Saudara menyebutkan ada ... ini ... nama-nama ini untuk apa ini? Ada Vandii, ada Donny, ini untuk apa ini? Jo ... Joni, Silvia, ini apa ini?

373. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PHP.BUP-XIX/2021: MOH. MAULANA

Itu yang di (...)

374. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ha?

375. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PHP.BUP-XIX/2021: MOH. MAULANA

Jadi, kalau untuk materi itu, Yang Mulia, itu saksi ... keterangan saksi yang diinput (...)

376. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oh, jadi saksi nanti yang didengar? Nanti jumlah saksi akan ditentukan oleh Mahkamah.

377. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PHP.BUP-XIX/2021: MOH. MAULANA

Ya, siap, Yang Mulia.

378. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Sekarang terakhir Petitumnya, silakan!

379. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PHP.BUP-XIX/2021: MOH. MAULANA

Ya. Petitum. Mengabulkan Permohonan, Yang Mulia.
Membatalkan keputusan Kabupaten Kutai Kertanegara.
Kemudian, menyatakan tidak sah dan tidak mengikat keputusan KPU Kabupaten Kutai Kertanegara.

Lalu selanjutnya, menyatakan tidak sah dan batal penetapan Edi Damansyah dan Rendi Solihin sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kutai Kertanegara, Yang Mulia.
Demikian (...)

380. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik.

381. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PHP.BUP-XIX/2021: MOH. MAULANA

Pokok Permohonan yang kami bacakan, Yang Mulia.
Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Wabillahtaufik walhidayah. Wassalamualaikum wr. wb.

382. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Walaikumsalam wr. wb. Ya, ini juga ... anu ... ya, yang tanda tangan ini masih Moh. Maulana, Nur Akifah Janur, A. Ikra Rahman, dan Herman. Ya, nanti kita cek kembali sesuai dengan Surat Kuasanya.

Baik. Ada, Prof. Saldi? Cukup. Yang Mulia Pak Manahan? Cukup.

Baik, terima kasih untuk Pemohon Perkara Nomor 75/PHP.BUP-XIX/2021.

Yang terakhir, dari Perkara Nomor 91/PHP.BUP-XIX/2021, ya?

383. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: SURURUDIN

Baik, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

384. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Walaikumsalam wr. wb.

385. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: SURURUDIN

Izin, Yang Mulia. Sebelumnya, kami ingin menyampaikan ada perubahan Surat Kuasa karena ada dari tim kami yang mengundurkan diri karena sakit. Dan kami akan menyerahkan Surat Kuasanya pada hari ini, Yang Mulia.

386. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Silakan! Itu sudah disterilisasi Surat Kuasa itu?

387. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: SURURUDIN

Sudah, Yang Mulia.

388. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Tolong, Mas, diambil!

389. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: SURURUDIN

Izin, Yang Mulia.

390. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

391. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: SURURUDIN

Selanjutnya, langsung pada Pokok-Pokok Perkara.

392. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Identitas dulu.

393. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: SURURUDIN

Baik, Yang Mulia.

394. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Pemohon ini, siapa?

395. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: SURURUDIN

Baik, Yang Mulia.

Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi ... KPU Kabupaten Kutai Timur Nomor 721 dan seterusnya dianggap dibacakan, Tahun 2020.

Perkenankan, dengan hormat, kami yang bertanda tangan di bawah ini untuk dan atas nama H. Mahyunadi, alamat dan seterusnya dianggap dibacakan. Dan H. Lulu Kinsu dan seterusnya dianggap dibacakan, sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Nomor Urut 1.

396. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik.

397. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: SURURUDIN

Berdasarkan Surat Kuasa dianggap dibacakan seterusnya.

398. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ini Harli Muin dan kawan-kawan, ya?

399. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: SURURUDIN

Ya. Baik, Yang Mulia.

400. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ada perubahan yang tidak jadi, siapa?

401. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: SURURUDIN

Yang tidak jadi Muhammad Nurul Haq, Yang Mulia.

402. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Muhammad Nurul Haq, baik.

403. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: SURURUDIN

Ya.

404. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Itu sudah dicoret, ya, jadi, ya?

405. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: SURURUDIN

Baik, Yang Mulia.

406. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Dalam Surat Kuasa baru?

407. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: SURURUDIN

Ya.

408. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke.

409. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: SURURUDIN

Ada pengunduran diri, Yang Mulia.

410. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Mengundurkan diri?

411. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: SURURUDIN

Ya, Yang Mulia.

412. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Terus?

413. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: SURURUDIN

Terhadap (...)

414. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Saudara yang akan Anda ... Anda bacakan, itu Permohonan yang mana?

415. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: SURURUDIN

Yang perbaikan, Yang Mulia.

416. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Perbaikan.

417. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: SURURUDIN

Tanggal 23 Desember 2020.

418. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Perbaikan itu 23 Desember, pukul 23.35 WIB.

419. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: SURURUDIN

Ya, Yang Mulia.

420. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Ya, silakan!

421. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: SURURUDIN

Terhadap Komisi Pemilihan Umum Kutai Timur sebagai Termohon.

422. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

423. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: SURURUDIN

Selanjutnya, poin 1, Kewenangan Mahkamah Konstitusi, dianggap dibacakan.

424. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Dianggap dibacakan.

425. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: SURURUDIN

Yang Mulia, Kedudukan Hukum Pemohon (...)

426. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Dianggap dibacakan.

427. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: SURURUDIN

Dianggap dibacakan.

428. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

429. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: SURURUDIN

Tenggang waktu pengajuan Permohonan, dianggap dibacakan.

430. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

431. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: SURURUDIN

Pokok Permohonan (...)

432. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Apa?

433. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: SURURUDIN

Satu. Mengenai ... kita tampilkan, Yang Mulia, perolehan suara berdasarkan Bukti P-4, yaitu Pemohon=55.050, Awang Ferdian Hidayat, Nomor 2=25.289, Ardiansyah Sulaiman dan Kasmidi Bulang=71.797.

434. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

435. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: SURURUDIN

Bahwa mengacu pada Ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020, selanjutnya dianggap dibacakan.

Bahwa objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah keputusan Termohon.

436. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

437. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: SURURUDIN

Dan selanjutnya, dianggap dibacakan.

Bahwa melalui norma Pasal 2 PMK Nomor 6 Tahun 2020, objek sengketa hasil pemilihan tidak lagi mengacu pada persentase selisih perolehan suara sah, namun pada perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih. Sehingga, dalam hal Pemohon mengajukan sengketa hasil pemilihan telah memenuhi ketentuan objek hasil pemilihan.

438. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

439. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: SURURUDIN

Bahwa dalam hal ini, Permohonan Pemohon telah memenuhi frasa tersebut sepanjang Pemohon telah menemukan sejumlah pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor 3, Ardiansyah Sulaiman dan Kasmidi Bulang.

Bahwa pelanggaran yang akan kami sampaikan adalah:
Satu. Ditemukannya fakta penggunaan KTP elektronik ganda menjelang hari pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan Bupati Tahun 2020.

440. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Satu. Penggunaan KTP elektronik ganda?

441. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: SURURUDIN

KTP yang dicetak lebih dari satu atau ganda, Yang Mulia.

442. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Yang kedua, apa?

443. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: SURURUDIN

Yang kedua. Ditemukannya fakta penggantian Pejabat Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur pada (...)

444. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, itu kalau ... anu ... lebih ... anu ... lebih sistematis.

445. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: SURURUDIN

Baik, Yang Mulia.

446. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ini yang nomor 1, kan ditujukan kepada Termohon?

447. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: SURURUDIN

Termohon.

448. KETUA: ARIEF HIDAYAT

KPU.

449. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: SURURUDIN

Ya, Yang Mulia.

450. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terus, yang kedua ada yang ini juga, banyak pemilih yang menggunakan DPTb?

451. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: SURURUDIN

DPTb, Yang Mulia. Betul, Yang Mulia.

452. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, itu dua. Itu kan temuan Termohon-Termohon dulu disebutkan.

453. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: SURURUDIN

Ya, baik, Yang Mulia.

454. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terus, kemudian?

455. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: SURURUDIN

Ditemukannya (...)

456. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ada ketidaksinkronan antara data pengguna hak pilih dengan surat yang digunakan?

457. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: SURURUDIN

Betul, Yang Mulia.

458. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, kan?

459. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: SURURUDIN

Ya, Yang Mulia.

460. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terus yang keempat, pengguna pemilih di dalam DPTb, ditambah jumlah DPTb, ditambah pemilih?

461. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: SURURUDIN

Ya.

462. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ini kan, ya?

463. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: SURURUDIN

Ya, betul, Yang Mulia.

464. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Jadi, berjumlah menjadi=25.584 itu?

465. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: SURURUDIN

Ya, betul, Yang Mulia.

466. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Di 160 TPS?

467. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: SURURUDIN

Ya, Yang Mulia.

468. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ini ... yang ... anu ... dulu, Termohon.

469. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: SURURUDIN

Ya, baik, Yang Mulia.

470. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baru sekarang kalau Mas mau masuk ke ... anu ... sudah selesai Termohon, masuk apa yang dilakukan oleh Pihak Terkait.

471. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: SURURUDIN

Baik, Yang Mulia.

472. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya? Nomor 5 itu Pihak Terkait?

473. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: SURURUDIN

Ya. Betul, Yang Mulia.

474. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Mutasi pejabat ASN.

475. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: SURURUDIN

Pihak Terkait, Yang Mulia.

476. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Mestinya dalam proses mau pilkada, dalam waktu berapa bulan yang enggak boleh?

477. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: SURURUDIN

6 bulan, Yang Mulia.

478. KETUA: ARIEF HIDAYAT

6 bulan enggak boleh geser-geser?

479. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: SURURUDIN

Ya. Betul, Yang Mulia.

480. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Dia melakukan itu?

481. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: SURURUDIN

Melakukan itu. Bahkan (...)

482. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ada izin dari menteri, enggak?

483. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: SURURUDIN

Tidak ada, Yang Mulia.

484. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oh, tidak ada.

485. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: SURURUDIN

Bahkan, dilaksanakan setelah ditetapkan sebagai pasangan calon, Yang Mulia.

486. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Nanti direspons oleh Pihak Terkait, bagaimananya itu?

487. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: SURURUDIN

Ya, Yang Mulia.

488. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terus?

489. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: SURURUDIN

Terus (...)

490. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan KIS?

491. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: SURURUDIN

KIS, Yang Mulia. Betul, Yang Mulia.

492. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Pilkada. Ya, kan?

493. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: SURURUDIN

Ya. Betul, Yang Mulia.

494. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Terus, apa lagi?

495. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: SURURUDIN

Ya. Selanjutnya (...)

496. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Program pembagian sembako?

497. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: SURURUDIN

Termasuk, Yang Mulia.

498. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Itu yang dipakai untuk memenangkan pasangan calon?

499. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: SURURUDIN

Ya, Yang Mulia.

500. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Dugaan pelanggaran-pelanggaran itu sudah dilaporkan di Bawaslu?

501. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: SURURUDIN

Ada di beberapa dilaporkan semua, tapi Bawaslu tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya, Yang Mulia.

502. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Nah, ini Bawaslu nanti merespons. Apakah yang sudah dilakukan atau belum?

503. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: SURURUDIN

Bawaslu dalam laporan kami terkait dengan laporan pengangkatan jabatan masa kampanye, Bawaslu memberikan ada pelanggaran, cuma tidak tegas memberikan sanksi terhadap Pihak Terkait, Yang Mulia.

504. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Itu saja, kan dalilnya?

505. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: SURURUDIN

Ya.

506. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

507. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: SURURUDIN

Terus, mengenai tidak bekerjanya Pihak Termohon secara baik, yaitu adanya pembukaan kotak suara, Yang Mulia.

508. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, apa itu?

509. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: SURURUDIN

Di Kecamatan Sangatta Utara, terkait dengan penggunaan KTP elektronik.

510. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

511. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: SURURUDIN

Dari hasil rekap pleno tanggal 11 dan 12 Desember di kecamatan (...)

512. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Itu ada di dalam Permohonan?

513. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: SURURUDIN

Ada, Yang Mulia.

514. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Halaman berapa itu?

515. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: SURURUDIN

Halaman 17, Yang Mulia.

516. KETUA: ARIEF HIDAYAT

17. Ya, terus?

517. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: SURURUDIN

Jadi, dari 20.262 KTP elektronik, itu digunakan secara terstruktur, sistematis, dan masif oleh Pihak Terkait bekerja sama dengan Pihak Termohon tanpa pengawasan yang ketat dari Bawaslu, sehingga ini bisa terlaksana.

Salah satunya, di Kecamatan Sangatta Utara. Pada tanggal 11 dan 12 Desember, sebagaimana halaman 18, Yang Mulia, terdapat kejanggalan dari proses rekapitulasi, sehingga Saksi kami meminta untuk dibuka kotak suara. Dan setelah dibuka kotak suara, ditemukan banyaknya DPT tambahan yang ditulis dalam secarik kertas, Yang Mulia, bukan dalam formulir resmi yang diatur sesuai dengan peraturan KPU.

518. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Terus, yang lain?

519. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: SURURUDIN

Ya. Dan ini jelas sangat ilegal, Yang Mulia. Sebagaimana di halaman 20, di Kecamatan Sangatta Utara juga ada bukti kami juga terlampirkan di TPS 25, TPS 36, TPS 65, dan TPS 75.

Selanjutnya juga, ada orang yang masuk ... sudah masuk dalam DPT, tapi dia masuk dalam DPT tambahan juga dari ... di ... di Desa Teluk Lingga, Swarga Bara, Singa Gembara yang di Desa Sangatta Utara itu ada semua di halaman 20 dan 21. Sehingga, dari seluruh kotak yang dibuka pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan 16, semuanya terdapat masalah yang sangat serius. Dan pada waktu saksi kami protes, "Kenapa tidak dibuka semua?" Pihak Termohon dan Pihak Bawaslu menjanjikan bahwa ini akan dibuka pada saat rekapitulasi tingkat

kabupaten. Namun, Pihak Termohon dan Pihak Bawaslu sama sekali tidak menjalankan komitmen untuk membuka kotak suara itu dan saksi kami dijegal. Bahkan ada yang ... karena protes, ditahan, Yang Mulia, oleh polisi. Itu, Yang Mulia.

Jadi, seharusnya di Sangatta Utara semua kotak dibuka karena di sini menggunakan KTP elektronik ganda itu ada sekitar lebih dari 7.000 dan Pihak Terkait memperoleh kemenangan sangat signifikan di kecamatan tersebut. Jadi, dari hasil rekapitulasi penggunaan KTP elektronik di kecamatan-kecamatan di Sangatta ... di seluruh kecamatan itu kita buat tabel di halaman 15. Ada 10 kecamatan, dimana Pihak Terkait itu memperoleh kemenangan semua linear dengan penggunaan KTP elektronik ganda di kecamatan-kecamatan tersebut. Misalkan di Kecamatan Sangatta Utara, totalnya ada sekitar 7.271 KTP elektronik yang dibuat. Jadi, pencetakan ini secara masif karena si Kasmidi Bulang adalah petahana yang menguasai birokrasi dan dia juga mengangkat (...)

520. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Itu baru asumsi itu.

521. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: SURURUDIN

Ya, Plt setelah masa kampanye. Dan saksi kami juga menyampaikan bahwa semua kemudahan-kemudahan itu (...)

522. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Nanti kita cek, apakah saksinya tanda tangan atau tidak, ya?

523. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: SURURUDIN

Baik, Yang Mulia.

524. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Pihak Terkait juga nanti ... anu ...

525. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: SURURUDIN

Izin.

526. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tapi ternyata nanti tanda tangan. Setelah kalah, baru protes dibawa ke sini, itu kan bisa saja, kan?

527. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: SURURUDIN

Ya. Izin, Yang Mulia. Saksi kami dipaksa untuk tanda tangan, Yang Mulia.

528. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, enggak bisa. Wong saksi kok.

529. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: SURURUDIN

Ya. Karena apabila tidak tanda tangan, tidak diserahkan C hasil, dan itu ada saksi kami akan hadir di persidangan untuk menjelaskan hal tersebut.

530. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, kalau itu jangan kalau saksi. Makanya, Anda juga harus mendrill saksinya.

531. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: SURURUDIN

Siap, Yang Mulia.

532. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Saksi dipaksa apapun jangan ... kalau memang protes, ya, jangan tanda tangan.

533. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: SURURUDIN

Ya, baik, Yang Mulia.

534. KETUA: ARIEF HIDAYAT

"Nanti ini saya tanda tangani, nanti dibawa ke MK." Bukti formalnya ada tanda tangan saksi.

535. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: SURURUDIN

Izin, Yang Mulia. Baik, Yang Mulia.

536. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

537. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: SURURUDIN

Selanjutnya, juga dalam proses persidangan ini yang kita mendaftarkan, Yang Mulia. Ternyata polisi melalui Gakkumdu menahan orang-orang yang ter ... yang sekarang P-21 disidang di pengadilan, mereka menggunakan KTP elektronik ini yang merupakan tim sukses dari Pasangan Kasmidi Bulang, pasangan petahana. Dan mereka saat ini sedang diproses di kepolisian karena mereka secara masif menggunakan mobil secara bersama-sama lima orang untuk putar-putar, Yang Mulia, menggunakan KTP elektronik ini, ya. Dan kami juga mendapatkan banyaknya KTP elektronik yang tidak diketahui oleh pemiliknya, tapi itu dicetak. Kita dapatkan dari orang-orang memperoleh itu, Yang Mulia.

538. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, nanti ada buktinya enggak itu?

539. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: SURURUDIN

Ada, Yang Mulia.

540. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

541. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: SURURUDIN

Dan kami juga sampaikan dari surat direktorat jenderal kependudukan dan catatan sipil mengenai pencetakan KTP yang tidak wajar. Karena dari perpindahan penduduk yang sekitar 4.000, tapi dicetak KTP 20.000. Jadi, tidak sampai seperempat orang berpindah atau dengan alasan ganti status, tapi dicetak sangat masif. Dan ini diketahui enam bulan sebelum pencoblosan, Yang Mulia. Jadi (...)

542. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Nanti kita ... ya, kita cek nanti, termasuk Termohon jumlah penduduknya berapa, yang punya hak pilih berapa, ya? Nanti di ... anu ... nanti kalau ada pergerakan penambahan yang enggak wajar, baru itu bisa di ... anu ... ya. Misalnya, pernah ditemukan, ya, di satu daerah yang mempunyai hak pilih itu 95%. Oh, berarti daerah itu di situ kan tua semua, enggak ada bayinya.

543. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: SURURUDIN

Ya, Yang Mulia.

544. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Nah, kayak begitu (...)

545. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: SURURUDIN

Demikian contohnya, Yang Mulia. KTP-KTP ganda yang baru ... baru semua, Yang Mulia. Ini kita dapatkan dan kita ... kita pastikan ini disalahgunakan dan ini dicetak baru karena ini hanya bisa oleh petahana. Dan ini kita tanyakan kepada pemilik mereka sudah punya, tapi kita juga punya, Yang Mulia. Dan ini yang kita dapatkan. Mungkin sekarang lebih banyak dimusnahkan karena kita permasalahan berkali-kali ke Bawaslu, Bawaslu tidak pernah menindaklanjuti ini secara serius. Padahal ini kan jelas, ada tindak pidana melalui ... melanggar Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, tapi Bawaslu kenapa tidak pernah menindaklanjuti dan (...)

546. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, nanti (...)

547. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: SURURUDIN

Terima kasih, Yang Mulia.

548. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, cukup. Yang lain lagi?

549. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: SURURUDIN

Izin, Yang Mulia. Kita tambahkan tambahan bukti-bukti, Yang Mulia, untuk kita serahkan.

550. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, tambahan bukti. Bukti sudah diserahkan tadi?

551. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: SURURUDIN

Kita diminta untuk menghadirkan di persidangan, Yang Mulia, sebelum disahkan.

552. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, tapi kan nanti ... tadi sudah disampaikan sebelum dimulai.

553. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: SURURUDIN

Baik, Yang Mulia.

554. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Bukti tambahannya supaya ... bukti tambahan itu harus diverifikasi.

555. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: SURURUDIN

Baik, Yang Mulia.

556. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Untuk bisa diverifikasi, harus diteliti dulu, ya?

557. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: SURURUDIN

Baik, Yang Mulia.

558. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Kan harus ada kupingnya, harus ada nomornya, ada daftarnya, ada enggak?

559. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: SURURUDIN

Sudah, Yang Mulia.

560. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Diambil, Mas, itu sekarang!

561. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: SURURUDIN

Baik, Yang Mulia.

562. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Mestinya diserahkan dari tadi.

563. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: SURURUDIN

Baik, Yang Mulia.

564. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Diambil, Mas! Nanti ini diverifikasi dulu, disahkan kemudian. Yang ada ... disahkan yang sudah ada. Silakan diambil, Mas!

565. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: SURURUDIN

Demikian, Yang Mulia.

566. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Itu namanya mempersulit, mestinya diserahkan dari tadi.

567. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: SURURUDIN

Selanjutnya, Yang Mulia, kita juga ingin (...)

568. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Petitum yang belum, silakan! Petitum sekarang.

569. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: SURURUDIN

Petitumnya, Yang Mulia.

Pertama. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Kutai Timur Nomor 721 dan seterusnya tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020 pukul 18.17 WITA sepanjang perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 Ardiansyah Sulaiman.

Menetapkan perolehan suara hasil pemilihan calon bupati dan wakil bupati dalam keputusan KPU dan seterusnya. Yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut.

Perolehan suara H. Mahyunadi=55.050, Awang Ferdian Hidayat dan Uce Prasetyo=25.289, Ardiansyah Sulaiman, M.Si. dan Kasmidi Bulang=51.535.

Hal ini kita ... dasar suara pengurangan Ardiansyah Sulaiman ini dikurangi dari hasil pencetakan KTP elektronik yang ganda tersebut, Yang Mulia.

Dan/atau mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya.

Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Kutai Timur Nomor 509 dan seterusnya dianggap dibacakan, tentang Penetapan Bakal Pasangan

Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi persyaratan administrasi, dokumen persyaratan percalonan, dan persyaratan calon menjadi pasangan calon dan ... dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur dan seterusnya dianggap dibacakan, sepanjang penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Drs. Ardiansyah Sulaiman dan H. Kasmidi Bulang.

Menyatakan Pasangan Nomor Urut 1 (H. Mahyunadi S.E., dan H. Lulu Kinsu) sebagai peraih suara terbanyak dan sebagai pasangan calon terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2020

Atau mengabulkan ... membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Kutai Timur Nomor 721 dan seterusnya dianggap dibacakan, Tahun 2020.

Tiga. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur untuk melakukan pemungutan suara ulang untuk seluruh tempat pemungutan suara di lima kecamatan, yaitu di wilayah kabupaten ... di wilayah Kabupaten Kutai Timur, yaitu Kecamatan Sangatta Utara, Sangatta Selatan, Bengalon, Muara Wahau, dan Kongbeng.

Atau membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Kutai Timur Nomor 721 dan seterusnya dianggap dibacakan, Tahun 2020.

Tiga. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Kutai Timur untuk melakukan pemungutan suara ulang untuk seluruh tempat pemungutan suara di wilayah Kabupaten Kutai Timur untuk semua Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur, kecuali Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Drs. Ardiansyah Sulaiman dan H. Kasmidi Bulang.

Terima kasih, Yang Mulia.

570. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih, ya.

Jadi untuk perhatian, ya. Supaya Termohon, dan Pihak Terkait, dan Bawaslu, itu masing-masing merespons apa yang ditunjukkan dalil, yang ditunjukkan kepada masing-masing, ya. Kalau misalnya berkenaan dengan KTP tadi, itu yang mampu merespons adalah Pihak Terkait, ya. Kalau itu kecurangan yang dilakukan berkenaan dengan DPHP dan sebagainya, berarti Termohon yang harus merespons. Kalau berkenaan dengan pelanggaran tadi, termasuk ada pelanggaran macam-macam, apakah itu sudah dilakukan oleh Bawaslu atau belum?

Nah untuk kepentingan ini, ya, supaya Saudara juga bisa fokus untuk merespons yang sangat berguna untuk Mahkamah mengambil putusan, maka Saudara silakan ini ada bukti tambahan, Saudara melakukan inzage, ya. Ini diperbolehkan melakukan inzage karena itu tadi, kan Saudara harus tahu bukti ini KTP benar atau enggak ini, ya, untuk Pihak Terkait.

Jadi, harus kita bersama. Anda di ... apa ... dituduh melakukan pelanggaran-pelanggaran ini, apakah betul pelanggaran ini? Ya, jadi Pihak Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu harus merespons, ya. Kalau itu tidak ada respons, berarti kita bisa menganggap bahwa itu betul, maka Saudara harus merespons. Supaya respons itu diperkuat, maka di dalam rangka merespons ada buktinya. Sehingga, semua data itu terekam dan masuk di dalam persidangan ini, ya.

Jadi, kita bisa memutus secara objektif, mana yang benar dan mana yang salah, itu karena pertimbangan-pertimbangan itu, ya. Tidak bisa Pemohon hanya berdasarkan asumsi, begitu juga jawaban Termohon dan Pihak Pihak Terkait hanya berdasarkan asumsi-asumsi tanpa bukti-bukti itu, ya.

Baik nanti silakan kalau mau melihat inzage itu, apa yang sudah ada, silakan!

Prof. Saldi, ada yang akan disampaikan? Cukup? Yang Mulia Bapak Manahan, ada? Silakan!

571. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik, tadi Pemohon sudah menyinggung tentang adanya laporan, ya, ke Pihak Bawaslu dan kemudian juga itu ke KPU dan ... apakah ini memang resmi ada pengaduan ke Bawaslu dan bagaimana respons daripada pengaduan itu dan selanjutnya?

Nah, tapi yang penting, apakah secara resmi pengaduan ini dilakukan kepada pihak penyelenggara, dalam hal ini Termohon dan Bawaslu?

572. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: HARLI MUIN

Perkara Nomor 91/PHP.BUP-XIX/2021, Yang Mulia, izin.

573. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Yang terakhir, ya?

574. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: HARLI MUIN

Ya. Yang Nomor 91/PHP.BUP-XIX/2021, kami memang melaporkan ke Bawaslu secara resmi di Kutai Timur.

575. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya.

576. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: HARLI MUIN

Lalu kemudian, dengan menggunakan Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020. Di sana sebenarnya, ada dua yang harus dilakukan oleh Bawaslu. Pertama adalah temuan dan kedua laporan. Yang kami lakukan laporan, itu berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5). Jadi laporannya di situ bisa terjadi setelah dikaji, ya. Masalahnya bisa muncul, apakah itu administrasi pidana pemilu, sengketa hasil, atau pelanggaran etik?

Nah, kami melaporkan Pasal 71 ayat (2), seluruhnya pelanggaran administrasi.

Nah, kemudian yang kami itu kemudian diteruskan ke pidana pemilu, Yang Mulia.

577. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik, terima kasih, itu saja (...)

578. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: HARLI MUIN

Jadi yang kedua ... yang kedua kami melapor lagi, Yang Mulia. Untuk ini (...)

579. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Sebentar, sebentar!

580. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: HARLI MUIN

Ya.

581. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Saya sudah menangkap, yang penting jangan asal di sini ada, tapi secara resmi ada laporan itu, ya. Itu yang harus ditegaskan.

582. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: HARLI MUIN

Benar, Yang Mulia. Tiga kali laporannya, Yang Mulia. Eh, lima kali, Yang Mulia.

583. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ini ada surat laporannya?

584. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: HARLI MUIN

Ada, Yang Mulia.

585. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ada dimasukkan sebagai bukti?

586. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: HARLI MUIN

Ya. Sebagian sudah masuk sebagai bukti, kami akan tambah lagi nanti sebagai bukti laporan dari Bawaslu. Karena kemarin kami lambat dapat dokumen ... ya.

587. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: SURURUDIN

Jadi, izin, Yang Mulia. Saat kita berprosesini, juga di ... apa ... beberapa kejadian juga terjadi, Yang Mulia. Jadi, kita akan susulkan.

588. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

589. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: SURURUDIN

Ada kejadian terkait dengan pidana itu, kita belum lampirkan karena memang prosesnya baru ... baru saja setelah administrasi di MK selesai.

590. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, segera di ... anukan ... buktinya.

591. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: SURURUDIN

Baik, Yang Mulia.

592. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

593. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: SURURUDIN

Ya, saya kira cukup, Yang Mulia.

594. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, Prof. Saldi, silakan!

595. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ini khusus untuk Bawaslu, ya. Jadi, enggak perlu Anda jawab sekarang, nanti kan ada waktu untuk menyampaikan keterangan.

Bawaslu itu yang paling penting adalah menjelaskan klaim-klaim dari Pemohon tadi itu. Jadi, pernah dia melapor, apa yang Saudara lakukan, apa putusannya, apa tindak lanjutnya? Karena itu akan menjadi poin penilaian.

Jadi, Mahkamah pernah memutuskan, kalau semua yang proses di tahap menjelang ... apa itu ... menjelang penyelesaian sengketa hasil, itu kan ada masing-masing lembaga yang menyelesaikannya. Kalau diselesaikan, kami sudah punya posisi ... apa ... Mahkamah, soal yang begitu. Kalau tidak diselesaikan, juga ada pernah dikemukakan Mahkamah dalam beberapa putusan.

Nah, dalam konteks itu, Bawaslu yang paling penting adalah menjelaskan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon. Itu yang paling penting, yang terutama terkait dengan kewenangan Bawaslu.

Jadi, nanti kalau mau ... apa ... kata Pak Ketua, kalau mau melaporkan yang lain-lain, boleh ditulis. Tapi, yang paling penting itu adalah Anda harus menjawab, menjelaskan klaim yang disampaikan atau dalil yang disampaikan Pemohon, ya, Prof., ya?

596. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

597. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Nah, itu. Karena itu akan kami nilai. Jadi, bukti dari Saudara akan kita adu dengan bukti yang disampaikan oleh ... apa ... oleh Pemohon. Lalu, ada bukti yang untuk dalil yang sama juga dari Termohon, tambah

nanti ... apa ... bukti yang disampaikan oleh Pihak Terkait. Itu yang akan diadu. Jadi, itu penting bagi kami untuk menilainya itu.

Jadi, kalau ... apa namanya ... Anda ... apa namanya ... Bawaslu ini kan dulu kami dalam kegiatan ini, pemilihan di kabupaten ini sudah melakukan ini, ini, ini, itu kayak laporan ke atasan itu. Yang diperlukan itu adalah how to ... bagaimana Anda merespons apa yang disampaikan oleh Pemohon tadi.

Begitu, Pak Ketua, terima kasih.

598. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, baik, terima kasih, Prof. Saldi.

Sebelum diakhiri, saya perlu menyampaikan, meminta klarifikasi dan mengesahkan alat bukti.

Perkara Nomor 62/PHP.KOT-XIX/2021, tidak mengajukan alat bukti? Mana alat buktinya? Lah, ini kenapa enggak diserahkan dari tadi? Gimana sih? Ha? Ini menghambat jalannya revolusi kalau begini ini, Saudara itu gimana, ha?

599. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PHP.KOT-XIX/2021: RINTO

Baik, Yang Mulia.

600. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Dari tadi saya sudah menganukan ... Pemohon yang terakhir tadi, alat buktinya. Sekarang Anda kok enggak tadi ikut proaktif menyerahkan alat bukti? Setelah ditanya, baru alat bukti. Gimana sih?

601. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PHP.KOT-XIX/2021: RINTO

Ya.

602. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Mana yang diserahkan?

603. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PHP.KOT-XIX/2021: RINTO

Baik, kami akan serahkan, Yang Mulia.

604. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ada daftarnya?

605. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PHP.KOT-XIX/2021: RINTO

Ada, Yang Mulia.

606. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Itu sudah disterilisasi, ada stikernya, enggak?

607. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PHP.KOT-XIX/2021: RINTO

Sudah, Yang Mulia.

608. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Lah, kenapa enggak diserahkan dari tadi? Dipegang saja. Sayang ya, menyerahkan alat bukti? Atau enggak diserahkan?

609. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 62/PHP.KOT-XIX/2021: RINTO

Siap, Yang Mulia.

610. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Kalau enggak diserahkan juga kebenaran, enggak ada buktinya, biar cepat diputus. Enggak ada buktinya. Loh, gimana, Saudara itu? Berniat beracara di sini, apa enggak? Ada daftarnya enggak itu? Diverifikasi sebentar, Mbak Haifa. Ha? Mana? Coba di ... anu, ya, diverifikasi dulu.

Perkara Nomor 75/PHP.BUP-XIX/2021? Pemohon Perkara Nomor 75/PHP.BUP-XIX/2021, bukti menyampaikan P-1 sampai dengan P-28?

611. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PHP.BUP-XIX/2021: MOH. MAULANA

Ya, benar, Yang Mulia.

612. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tapi bukti fisiknya di daftar ada, tapi di bukti fisiknya enggak ada, P-20C dan P-28 ... eh, P-22B.

613. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PHP.BUP-XIX/2021: MOH. MAULANA

Jadi, ikatan dengan bukti itu, Yang Mulia (...)

614. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ha?

615. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PHP.BUP-XIX/2021: MOH. MAULANA

Adalah bukti video. Kami juga telah menyerahkan kemarin dalam bentuk flashdisk, Yang Mulia, pada saat verifikasi.

616. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Coba nanti diklarifikasi lagi, ya?

617. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PHP.BUP-XIX/2021: MOH. MAULANA

Baik, Yang Mulia.

618. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, jadi ini memang ada P-1 sampai dengan P-28 di daftarnya. Tapi, bukti fisiknya itu yang P-20C sama P-22B itu yang enggak ada. Masih ada, enggak? Kalau masih ada, ditambahkan bukti fisiknya. Atau kalau tidak ada, ya, dicoret yang ini, hanya khusus P-20C dan P-22B. Ya, nanti ke ... anu, ya, setelah sidang ini selesai.

Saudara mengajukan sementara disahkan P-1 sampai dengan P-28, kecuali bukti fisiknya tidak ada P-20C dan P-22B. Disahkan.

KETUK PALU 1X

619. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PHP.BUP-XIX/2021: MOH. MAULANA

Siap, Yang Mulia.

620. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Kemudian, Perkara Nomor 91/PHP.BUP-XIX/2021. Ini masih banyak bukti yang belum bisa diklarifikasi, diverifikasi, ya. Sehingga yang sudah ada, Saudara mengajukan Bukti P-1A sampai dengan P-34, betul? Tapi yang tidak ada bukti fisiknya P-8, P-10, P-29, dan P-19, itu enggak ada.

Masih punya? Kalau masih punya, nanti ditambahkan itu. Tolong dicatat, P-8, P-10, P-19, P-29, enggak ada, ya? Nanti yang tambahan disahkan besok bersamaan dengan bukti ... kita mengesahkan bukti pihak yang lain.

Ya, jadi P-1A sampai dengan P-34 disahkan, kecuali P-8, P-10, P-19, P-29 yang tidak ada bukti fisiknya. Disahkan.

KETUK PALU 1X

621. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: SURURUDIN

Baik, Yang Mulia, terima kasih.

622. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Kemudian ini untuk Pihak Terkait. Masing-masing Pihak Terkait dinyatakan dikabulkan Permohonannya untuk menjadi Pihak Terkait setelah kita teliti, ya.

Untuk yang pertama, Perkara Nomor 62/PHP.KOT-XIX/2021 Permohonan atas nama Pak Rahmat Mas'ud dan Pak Thoari, ya.

Kemudian, Perkara Nomor 75/PHP.BUP-XIX/2021 atas nama Drs. Edi Damansyah dan H. Rendi untuk Kabupaten Kutai Kartanegara.

Kemudian yang berikutnya, sama untuk Perkara Nomor 91/PHP.BUP-XIX/2021, ini kabupaten ... oh namanya anu ... untuk Kabupaten Kutai Timur atas nama Drs. Ardiansyah Sulaiman dan Kasmidi Bulang.

Ini semuanya, ketiga-tiganya dikabulkan untuk menjadi Pihak Terkait. Maka dalam persidangan yang akan datang, Saudara sudah bisa menyampaikan keterangannya disertai dengan ... dikuatkan dengan bukti-buktinya dan Saudara sudah langsung bisa duduk di depan situ, ya? Baik.

Ya, ini yang Perkara Nomor 62/PHP.KOT-XIX/2021, Saudara hanya mengajukan bukti itu hanya rangkap 1. Mestinya, kan Anda sudah tahu, kan di dalam PMK buktinya harus rangkap berapa? Terus kemudian, belum menyerahkan kopi alat buktinya. Ini, ya? Tapi nanti diurus, kemudian disahkan. Hanya ada 1 eksemplar, Bukti P-1 sampai dengan P-52, ya. Disahkan.

KETUK PALU 1X

Supaya lengkap, nanti dilengkapi, tapi P-1 sampai dengan P-52 ada.

Kemudian, sidang nanti ditunda. Untuk Perkara Nomor 62/PHP.KOT-XIX/2021 itu Senin, 1 Februari 2021, pada pukul 14.00 WIB. Saya ulangi, Perkara Nomor 62/PHP.KOT-XIX/2021 ditunda Senin, 1 Februari 2021, pada pukul 14.00 WIB, dengan agenda mendengarkan keterangan ... mendengarkan jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, dan keterangan Bawaslu, ya.

Terus kemudian, Perkara Nomor 75/PHP.BUP-XIX/2021, Selasa, 2 Februari 2021, pukul 09.00 WIB, dengan agenda yang sama, mendengarkan jawaban Termohon, mendengarkan keterangan Pihak Terkait ... pada pukul 08.00 WIB, ya. Selasa ... saya ulangi. Selasa, 2 Februari, pukul 08.00 WIB, agendanya mendengarkan jawaban Termohon, mendengarkan keterangan Pihak Terkait, dan keterangan Bawaslu.

Kemudian, untuk Perkara Nomor 91/PHP.BUP-XIX/2021 sama dengan Perkara Nomor 75/PHP.BUP-XIX/2021, 2 Februari, pukul 08.00 WIB, dengan agenda yang sama, mendengarkan jawaban Termohon, mendengarkan keterangan Pihak Terkait, dan keterangan Bawaslu.

Perlu saya sampaikan bahwa bukti-bukti bagi Pihak Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu, kalau jumlahnya 1 kontainer seperti itu bisa diserahkan ... kalau banyak jumlahnya bisa diserahkan 1 hari sebelum hari sidang supaya disampaikan ke Kapaniteraan untuk diproses sterilisasinya, ya? Kalau itu bukti tambahan yang jumlahnya sedikit, berapa eksemplar gitu, bisa dibawa pada waktu mau menghadiri sidang, tapi juga melalui proses sterilisasi dulu di bawah, ya? Begitu Termohon, Bawaslu, dan Pihak Terkait, ya, bisa dimengerti? Baik.

Yang terakhir, sebelum saya tutup. Pada waktu sidang yang sudah ditentukan ini, Saudara, apabila Saudara mempunyai surat hasil tes antigen yang dikeluarkan oleh lembaga resmi, yang masih berlaku 2 hari, cukup hanya berlaku 2 hari saja, Anda bisa membawa surat itu. Tetapi kalau Anda tidak, maka Anda akan diantigen di bawah seperti tadi, ya? Tetapi, meskipun Saudara sudah mempunyai surat yang masih berlaku dan dikeluarkan oleh lembaga resmi, kalau suhu tubuh Saudara menunjukkan ada indikasi demam, maka Saudara juga bisa tidak diperbolehkan hadir di sini dan bisa juga Saudara akan diantigen lagi di tempat di sini, ya? Karena kita bersama menjaga protokol kesehatan supaya di dalam rangka persidangan ini tidak ada yang terpapar Covid-19. Begitu? Ada yang akan disampaikan? Cukup, ya?

623. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: DONAL FARIZ

Sedikit, Yang Mulia. Izin.

624. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Dari mana?

625. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: DONAL FARIZ

Dari Pihak Terkait, Yang Mulia.

626. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke. Silakan!

627. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: DONAL FARIZ

Berarti diperkenankan surat keterangan rapid antigen dari pihak yang berwenang (...)

628. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

629. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: DONAL FARIZ

Mohon penjelasan, Yang Mulia, 2 hari sejak atau 2 hari setelah, Yang Mulia?

630. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, pokoknya yang masih berlaku.

631. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: DONAL FARIZ

Masih yang berlaku. Berarti 2 hari setelah (...)

632. KETUA: ARIEF HIDAYAT

2 hari.

633. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: DONAL FARIZ

Rapid antigen, begitu, Yang Mulia.

634. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, 2 hari.

635. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: DONAL FARIZ

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

636. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Pokoknya 2 hari masih berlaku itu, ya?

637. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 91/PHP.BUP-XIX/2021: DONAL FARIZ

Terima kasih, Yang Mulia.

638. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Misalnya antigen hari ini, itu dipakai besok, itu kan masih berlaku, ya. Jadi, itu bisa. Supaya semuanya berjalan lancar dengan baik dan semuanya dalam keadaan sehat, ya. Semoga Allah SWT memberikan kesehatan pada kita semua.

Ya, ada lagi yang akan disampaikan? Cukup? Prof. Saldi, cukup? Yang Mulia Pak Manahan? Cukup.

Baik. Kalau begitu, terima kasih atas persidangannya pada hari ini, perhatiannya. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.19 WIB

Jakarta, 26 Januari 2021
Panitera,
Muhidin

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

